

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**Dr. HILARIUS DUHA.SH.,MH
BUPATI NIAS SELATAN**

**FIRMAN GIAWA.SH.,MH
WAKIL BUPATI NIAS SELATAN**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dapat terselesaikan.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan hanya sekedar menyatakan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang terpenting adalah apakah program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban inilah yang disebut dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan. Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang tercipta korupsi, kolusi dan nepotisme.



LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dalam upaya memenuhi Visi **“Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat dan Cerdas Dengan Kepemimpinan Yang Melayani, Jujur dan Sederhana”**, yang telah memasuki tahun keempat masa jabatan Kepala Daerah terpilih.

Akhirnya diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Instansi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kita semua.

Telukdalam, 31 Maret 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan.....	2
C. Kondisi Umum Kabupaten Nias Selatan.....	17
D. Permasalahan Yang Dihadapi.....	23
E. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2021.....	40
F. Landasan Hukum.....	41
G. Sistematika Penyajian.....	44
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	46
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..	46
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	53
C. Perencanaan Anggaran.....	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	69
A. Capaian Kinerja.....	71
B. Akuntabilitas Keuangan.....	125
C. Penghargaan.....	133
BAB IV PENUTUP.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020	7
Tabel 1.4	APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2021.....	10
Tabel 1.5	Luas dan Jenis Tanaman Perkebunan Per Kecamatan Di Kabupaten Nias Selatan (hektar), 2021	12
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis kelamin di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.....	20
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Instansi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021	21
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021	55
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias - Selatan Tahun 2021	59
Tabel 2.3	Perencanaan Anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021	61
Tabel 2.4	Perencanaan Anggaran Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.....	66
Tabel 3.1	Interprestasi Capaian Kinerja	69
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	72
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	77
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	80
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4.....	81
Tabel 3.6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2021	



	Kabupaten Nias Selatan.....	82
Tabel 3.7	Daftar Pembangunan Jembatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021	86
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	88
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	91
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	93
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	94
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	95
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	97
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11	98
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12	100
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13	102
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14	103
Tabel 3.18	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15	104
Tabel 3.19	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16	106
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17	107
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18	109
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19	111
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20	113
Tabel 3.24	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21	115
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24	117
Tabel 3.26	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25	119
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26	120
Tabel 3.28	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27	122
Tabel 3.29	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 28	124
Tabel 3.30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah – Tahun Anggaran 2021	129
Tabel 3.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	131
Tabel 3.32	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan.	4
Gambar 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015-2020.....	9



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021, yang diformulasikan dari hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap organisasi perangkat daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2021 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran dan indikator kinerja apa yang akan dicapai pada tahun 2021. Dalam pencapaian tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



1. Pendidikan

Secara umum capaian kinerja Pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam bidang pendidikan dapat dikategorikan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan yaitu tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta meningkatnya akuntabilitas dan kinerja dinas pendidikan dengan rata-rata capaian sebesar 77%.

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 cukup berhasil. Hal ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mewujudkan misinya dalam menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di bidang kesehatan, rata-rata capaian kinerjanya mencapai 64%.

3. Pertanian dan Perikanan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Nias Selatan terus dilakukan pada dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perikanan.

Pada sektor pertanian, upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan produk-produk pertanian adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan jumlah kelompok tani. Dari upaya tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pertanian dapat menyumbangkan PDRB di Kabupaten Nias Selatan sebesar 44,61% dari total PDRB ADHB Kabupaten Nias Selatan sebesar 7.164,27 milyar rupiah.



Sedangkan pada sektor perikanan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan produksi ikan tangkap dan produksi ikan budidaya. hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan PDB Sektor perikanan yang mencapai 5,37% pada tahun 2021.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan mencapai 5,64%, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nias selatan meningkat 0,61%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat



3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Nias Selatan diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian oleh Drs. Nabari Ginting, Msi.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada $0^{\circ} 33' 25''$ LS – $1^{\circ} 4' 5''$: U dan $97^{\circ} 25' 59''$ – $98^{\circ} 48' 29''$ BT.



Letak geografis Kabupaten Nias Selatan di sebelah Barat pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Kota Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala ($39,67 \text{ km}^2$), Pulau Tanah Masa ($32,16 \text{ km}^2$), Pulau Telo (18 km^2) dan Pulau Pini ($24,36 \text{ km}^2$).

Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 24%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit sampai pegunungan mencapai 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias memiliki luas wilayah administrasi $6.902.505 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 104 (seratus empat buah pulau, 18 (delapan belas) kecamatan yang kemudian pada tahun 2012 jumlah kecamatan berkembang menjadi 35 kecamatan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 459 Desa.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 adalah $2.487,98 \text{ Km}^2$.

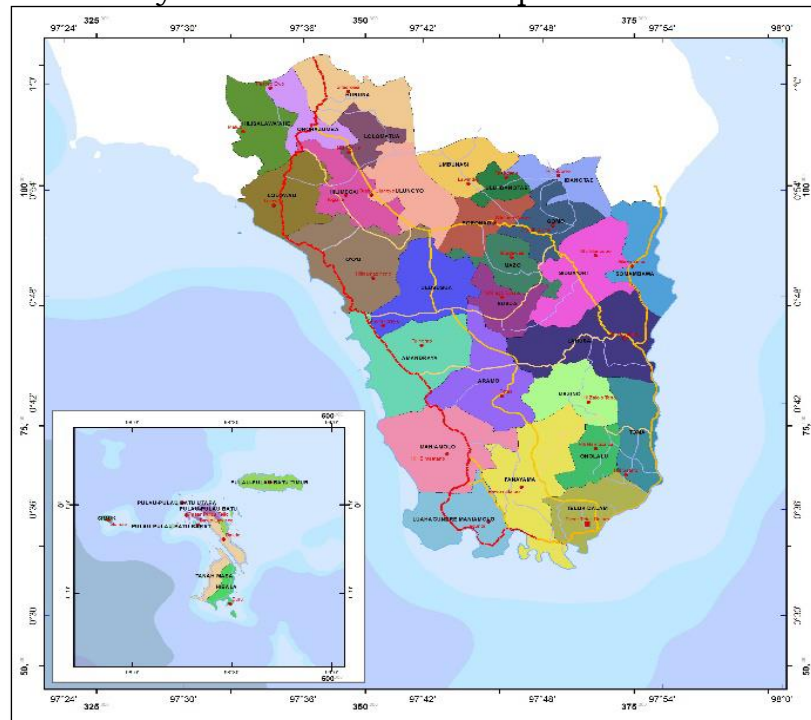
Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan



Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan terbagi atas 35 Kecamatan, 459 Desa dan 2 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Amandraya	21	-
2	Aramo	18	-
3	Boronadu	10	-
4	Fanayama	17	-
5	Gomo	11	-
6	Hibala	17	-



7	Hilimegai	10	-
8	Hilisalawa'ahe	11	-
9	Huruna	17	-
10	Idanotae	12	-
11	Lahusa	23	-
12	Lolomatua	13	-
13	Lolowau	14	-
14	Luahagundre Maniamolo	10	-
15	Maniamolo	14	-
16	Mazino	11	-
17	Mazo	10	-
18	O'ou	11	-
19	Onohazumba	10	-
20	Onolalu	10	-
21	Pulau-pulau Batu	21	1
22	Pulau-pulau Batu Barat	9	-
23	Pulau-pulau Batu Timur	10	-
24	Pulau-pulau Batu Utara	12	-
25	Sidua'ori	11	-
26	Somambawa	14	-
27	Susua	18	-
28	Simuk	6	-
29	Tanah Masa	12	-
30	Teluk Dalam	15	1
31	Toma	14	-
32	Uluoyo	13	-
33	Ulu Idanotae	11	-
34	Ulususua	12	-
35	Umbunasi	11	-
Jumlah		459	2

Sumber data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021

3. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 mencapai 360.531 jiwa. Tingkat



Kepadatan penduduk rata-rata 160,16 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km².

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Kelompok Umur / Tahun	Jumlah	Persentase
1	0 - 4	29.047	8.06%
2	5 - 9	32.417	8.99%
3	10 - 14	40.233	11.16%
4	15 - 19	42.933	11.91%
5	20 - 24	42.593	11.81%
6	25 - 29	34.860	9.67%
7	30 - 34	28.953	8.03%
8	35 - 39	22.841	6.34%
9	40 - 44	21.899	6.07%
10	45 - 49	17.643	4.89%
11	50 - 54	15.117	4.19%
12	55 - 59	11.583	3.21%
13	60 - 64	8.607	2.39%
14	64 - 69	5.534	1.53%
15	70 - 74	3.973	1.10%
16	75+	2.298	0.64%
Jumlah		360.531	100%

Sumber data : BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Dari tahun 2019-2020 Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Selatan berada di angka 0,85% dan pada tahun 2020-2021 menurun ke angka 0,81%. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan disebabkan selain karena upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menerapkan program Keluarga Berencana (KB), juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemerintah dimaksud. Selain penerapan program Keluarga Berencana yang terus digalakkan



oleh Pemerintah, penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan juga dipengaruhi oleh adanya ketentuan pembatasan usia menikah serta adanya pembatasan pemberian tunjangan anak bagi masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan jumlah pendudukan Kabupaten Nias Selatan menurut kecamatan pada tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Hibala	7.716
2	Tanah Masa	4.807
3	Pulau-pulau Batu	9.731
4	Pulau-pulau Batu Timur	3.091
5	Simuk	1.934
6	Pulau-pulau Batu Barat	2.320
7	Pulau-pulau Batu Utara	3.894
8	Teluk Dalam	25.480
9	Fanayama	18.207
10	Toma	13.316
11	Maniamolo	13.855
12	Mazino	8.735
13	Luahagundre Maniamolo	10.307
14	Onolalu	8.474
15	Amandraya	14.059
16	Aramo	9.977
17	Ulususua	10.667
18	Lahusa	20.858
19	Sidua'ori	11.354
20	Somambawa	14.102
21	Gomo	10.544
22	Susua	16.811
23	Mazo	12.674
24	Umbunasi	7.583
25	Idanotae	10.102
26	Ulu Idanotae	7.185
27	Boronadu	7.483
28	Lolomatua	11.072



29	Ulunoyo	13.035
30	Huruna	13.135
31	Lolowau	9.645
32	Hilimegai	6.926
33	O'o'u	8.825
34	Onohazumba	6.883
35	Hilisalawa'ahe	5.744
Nias Selatan		360.531

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2021

4. Angka Kerja dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nias Selatan mencapai 165.452 jiwa. Dimana pada tahun 2021, angkatan kerja yang bekerja sejumlah 158.587 orang dan angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka) berjumlah 6.865 orang. Angkatan kerja tersebut sebagian besar masih berpendidikan SD/sederajat ke bawah.

Sampai dengan tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Nias Selatan mencapai 77,14. Sedangkan pada tahun sebelumnya, jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 72,22. Artinya bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya



membangun kualitas hidup manusia serta merupakan data strategis selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, IPM Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 berada pada angka 61,89 point. Nilai IPM Kabupaten Nias Selatan ini meningkat beberapa point dari tahun 2019 lalu yaitu 61,59 point.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Untuk dapat melihat peningkatan IPM Kabupaten Nias Selatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Nias Selatan Dari Tahun 2015-2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021



6. Pendidikan

Tolok ukur keberhasilan di bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan kata lain APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketetapan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada pendudukan yang sekolah belum mencukupi umur yang seharusnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan diketahui bahwa APM dan APK Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2021 menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2021

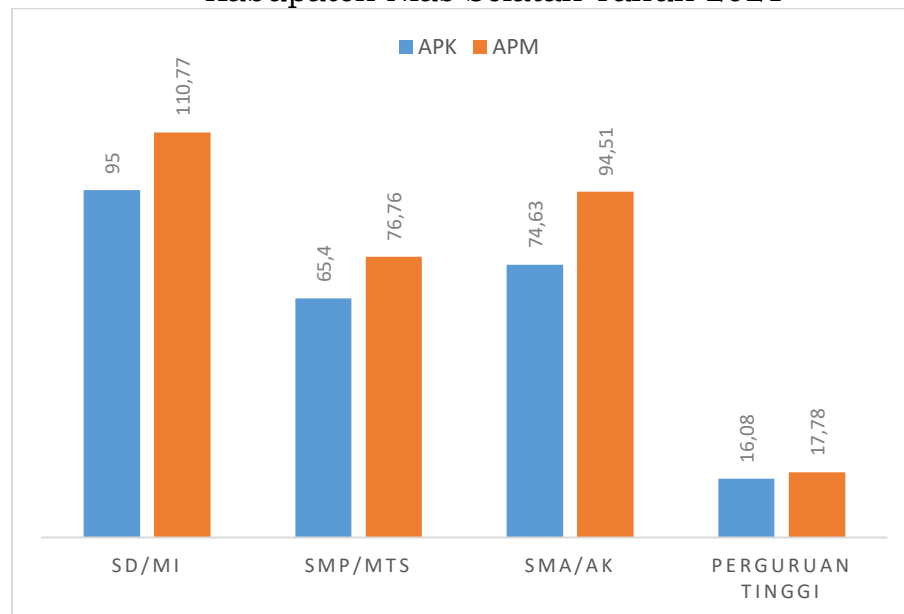
Jenjang Pendidikan	2020		2021	
	APM	APK	APM	APK
SD/MI	95,91	109,39	95,00	110,77
SMP/MTs	70,74	85,25	65,40	76,76
SMA/SMK/MA	66,73	87,81	74,63	94,51
Perguruan Tinggi	10,86	16,70	16,08	17,78

Sumber data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021



Untuk mengetahui dengan jelas Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
APK dan APM
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021



Sumber Data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021

7. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 adalah 68,74 dan menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 naik menjadi 68,74. Dalam upayanya, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus berupaya secara komprehensif dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral dalam rangka mewujudkan perbaikan di bidang kesehatan dengan capaian utama adalah angka harapan hidup dan indeks kesehatan. Angka Harapan Hidup pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Seperti diketahui bahwa angka harapan hidup diyakini memiliki hubungan berbanding



terbalik terhadap kemiskinan. Peningkatan angka harapan hidup dipercaya mampu menekan bahwa mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut diyakini bahwa angka harapan hidup yang tinggi menandakan bahwa kesehatan di wilayah tersebut terjamin. Hal ini tentu sangat berdampak pada peningkatan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak kerja dan menaikkan output energi.

8. Sumber Daya Alam

a. Kawasan Perkebunan

Pemanfaatan lahan untuk perkebunan di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet dan kakao. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, luas tanaman perkebunan di Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Luas dan Jenis Tanaman Perkebunan Per Kecamatan
Di Kabupaten Nias Selatan (hektar), 2021

No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kakao
1	Hibala	-	760	54	109
2	Tanah Masa	-	1.853	50	115
3	PP. Batu	-	1.852	63	92
4	PP. Batu Timur	-	650	128	98
5	Simuk	-	973	47	103
6	PP. Batu Barat	-	1.454	56	106
7	PP. Batu Utara	-	1.155	46	106
8	Teluk Dalam	7	1.058	327	123
9	Fanayama	153	796	393	137
10	Toma	21	553	152	233
11	Maniamolo	313	1.759	627	156
12	Mazino	7	336	194	313
13	Luahagundre	148	708	131	111



14	Onolalu	35	255	725	303
15	Amandraya	236	553	1.120	296
16	Aramo	-	57,5	245	162
17	Ulususua	3	52	181	173
18	Lahusa	-	897	132	244
19	Sidua'ori	-	160	178	116
20	Somambawa	-	359	130	121
21	Gomo	-	38	177	145
22	Susua	-	79	139	99
23	Mazo	-	73	167	113
24	Umbunasi	-	73	140	122
25	Idanotae	-	67	161	104
26	Ulu Idanotae	-	59	142	105
27	Boronadu	-	69	155,25	129
28	Lolomatua	-	152	1.035	362
29	Uluoyo	-	370	821	151
30	Huruna	-	429	536	177
31	Lolowau	-	1.083	627	225
32	Hilimegai	-	81	1.064	150
33	O'ou	5	892	404	195
34	Onohazumba	-	50	437	203
35	Hilisalawa'ahe	-	489	462	215
Nias Selatan		931	20,330,50	11.446,25	5.712

Sumber data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021

b. Kawasan Pertanian

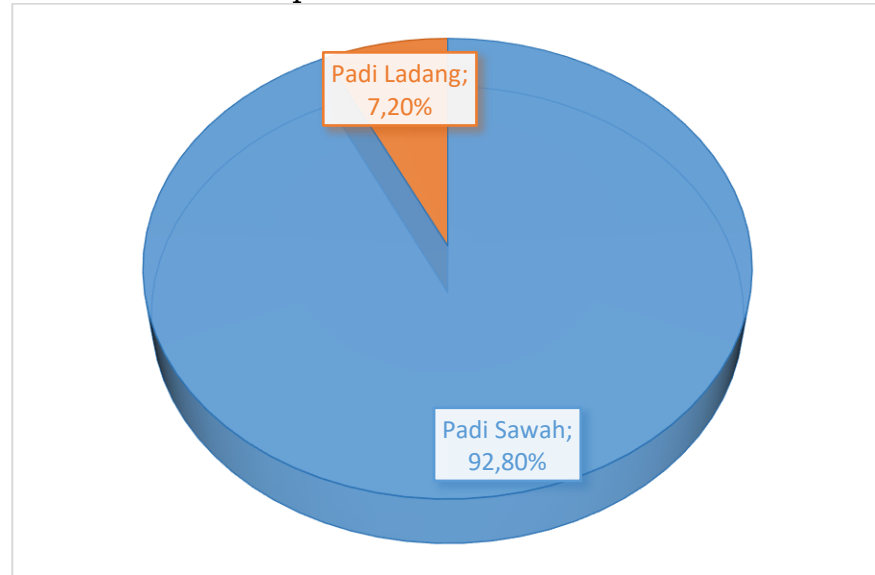
Selain kawasan perkebunan, potensi sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan adalah sektor pertanian. Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Nias Selatan meliputi kawasan tanaman pangan lahan kering yaitu tanaman jagung, cabe dan lain-lain serta kawasan tanaman lahan basah yaitu sawah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2021 luas panen padi sawah memiliki proporsi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan luas panen padi ladang yaitu 92,80%.



Persentase luas panen padi sawah dan luas panen padi ladang di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Persentase Luas Panen Padi dan Padi Ladang
Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021



Sumber data: BPS Kabupaten Nias Selatan, 2021

Sedangkan luas panen padi di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 mencapai 18.921 ha, dengan produktivitas padi sebesar 102,86 kuintal/ha serta produksi padinya sebesar 108.985 ton.

Selain tanaman padi, jenis tanaman lain yang ada di Kabupaten Nias Selatan adalah tanaman hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit dan buah-buahan seperti pisang. Pada tahun 2021, luas panen cabai besar mencapai 101 hektar dengan produksi sebanyak 372 kuintal sedangkan untuk cabai rawit, luas panen cabai rawit mencapai 63 hektar dengan produksi sebanyak 205 kuintal. Selain tanaman hortikultura, jenis tanaman lain yang sedang berkembang di Kabupaten Nias Selatan adalah tanaman biofarmaka. Adapun jenis tanaman biofarmaka yang sedang berkembang di Kabupaten Nias Selatan adalah tanaman jahe dan tanaman kapulaga. Hingga tahun 2021, luas tanaman jahe di Kabupaten Nias Selatan mencapai



5.717 m² dan tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Huruna, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur dengan produksi sebanyak 8.036 kg dan luas panen tanaman kapulaga mencapai 45.840 m² dan tersebar di Kecamatan Hibala, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Lolowau dengan produksi sebesar 31.820 kg.

c. Kawasan Perikanan

Sebagai salah satu wilayah yang berada di Kepulauan Nias yang dikelilingi oleh lautan luas, Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi yang sangat besar terhadap sektor perikanan. Hal ini terlihat dari luasan wilayah laut yang dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, jumlah produksi ikan laut pada tahun 2021 adalah 8.503 ton. Adapun wilayah yang memproduksi ikan paling banyak di Kabupaten Nias Selatan adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur, Kecamatan Teluk Dalam dan beberapa kecamatan yang memiliki wilayah laut dan kolam ikan seperti Kecamatan Fanayama, Kecamatan Toma, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Mazino, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Aramo, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Gomo, Kecamatan Susua, Kecamatan Mazo, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Hilimegai.

d. Kawasan Pariwisata

Selain sektor perkebunan, pertanian dan sektor perikanan, potensi lain yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Nias Selatan adalah kawasan



sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan yang terus di galakkan di Kabupaten Nias Selatan karena wilayah Kabupaten Nias Selatan memiliki kekayaan wisata bahari dan wisata budaya yang sudah mendunia. Daerah wisata bahari yang ada di Kabupaten Nias Selatan seperti pantai lagundri dan pantai sorake yang ada di Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Pantai Moale di Kecamatan Lolowau, Pantai Fetalasa di Kecamatan Pulau-pulau Batu serta beberapa pantai lain yang ada di 7 Kecamatan wilayah kepulauan Kabupaten Nias Selatan.

Selain wisata bahari, destinasi wisata lain yang dapat ditemukan di Kabupaten Nias Selatan adalah wisata budaya seperti Rumah Adat Besar di Bawomataluo Kecamatan Fanayama, atraksi budaya (tari perang) dan lompat batu di wilayah Kecamatan Fanayama, Luahagundre Maniamolo dan Kecamatan Maniamolo, Batu megalit yang ada di Kecamatan Gomo dan Kecamatan Fanayama.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, jumlah wisatawan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami tren peningkatan yang cukup bagus. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7%. Wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 59,51% sementara wisatawan domestik meningkat sebesar 3,54%. Namun pada tahun 2020, tren peningkatan jumlah wisatawan mengalami penurunan hingga mencapai 85,45%. Hal ini tentu bukan semat-semata karena kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan terhadap sektor pariwisata, akan tetapi disebabkan oleh masih mewabahnya Covid-19.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 hanya berjumlah 10.633 wisatawan . jumlah tersebut menurun sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 65.298 wisatawan pada tahun 2019.

C. Kondisi Umum Kabupaten Nias Selatan

Dalam kondisi umum Kabupaten Nias Selatan akan diuraikan mengenai kondisi Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara pemerintahan.

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah (Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10_45 Tahun 2019), terdiri dari:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Bagian Kerjasama;
 - 5) Bagian Perekonomian;
 - 6) Bagian Sumber Daya Alam;
 - 7) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9) Bagian Umum;



- 10) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - 11) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 12) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Badan Daerah, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Dinas Daerah, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Dinas Perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan P2TSP;
 - 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
 - 17) Dinas Perpustakaan;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;



- 19) Dinas Pertanian; dan
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Teluk Dalam;
 - 2) Kecamatan Fanayama;
 - 3) Kecamatan Maniamolo;
 - 4) Kecamatan Aramo;
 - 5) Kecamatan Amandaraya;
 - 6) Kecamatan Lolowau;
 - 7) Kecamatan Hilimegai;
 - 8) Kecamatan Lolomatua;
 - 9) Kecamatan Mazino;
 - 10) Kecamatan Toma;
 - 11) Kecamatan Lahusa;
 - 12) Kecamatan Umbunasi;
 - 13) Kecamatan Susua;
 - 14) Kecamatan Mazo;
 - 15) Kecamatan Pulau-pulau Batu;
 - 16) Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
 - 17) Kecamatan Hibala;
 - 18) Kecamatan Ulunoyo;
 - 19) Kecamatan Huruna;
 - 20) Kecamatan O'ou;
 - 21) Kecamatan Onohazumba;
 - 22) Kecamatan Hilisalawa'ahe;
 - 23) Kecamatan Ulususua;
 - 24) Kecamatan Sidua'ori;
 - 25) Kecamatan Somambawa;
 - 26) Kecamatan Boronadu;
 - 27) Kecamatan Simuk;
 - 28) Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
 - 29) Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;



- 30) Kecamatan Tanah Masa;
- 31) Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 32) Kecamatan Onolalu;
- 33) Kecamatan Gomo;
- 34) Kecamatan Idanotae; dan
- 35) Kecamatan Uluidanotae.

2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah 4.193 orang yang terbagi ke dalam 2.463 orang laki-laki dan 1.730 orang perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sampai dengan SD	17	0	17
2	SLT/Sederajat	16	1	17
3	SMA/Sederajat	790	203	993
4	Diploma I, II, III/Akta IV	384	612	996
5	Sarjana/Dokter/Ph.D	1.156	889	2.045
Total		2.363	1.705	4.068

Sumber data: BKD Kabupaten Nias Selatan, 2021



Sedangkan jumlah PNS di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan instansi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Menurut Instansi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat Daerah	76	35	111
2	Sekretariat DPRD	18	8	26
3	Inspektorat	20	15	35
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22	12	34
5	Badan Kepegawaian Daerah	21	14	35
6	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	14	6	20
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	4	16
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	35	24	59
9	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	19	22	41
10	Dinas Lingkungan Hidup	15	5	20
11	Dinas Ketahanan Pangan	25	7	32
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	12	14	26
13	Dinas Pertanian	15	9	24
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	17	5	22
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	4	17
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	3	53
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17	1	18
18	Dinas Sosial	12	12	24
19	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	10	3	13
20	Dinas Perhubungan	24	1	25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22	4	26
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11	4	15
23	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	11	13	24
24	Dinas Perpustakaan	7	11	18
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	5	13
26	Dinas Pendidikan	61	25	86
27	Dinas Kesehatan	38	33	71
28	Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat	14	1	15



29	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan	1.152	768	1920
30	Kantor Camat Amandraya	20	3	23
31	Kantor Camat Aramo	14	2	16
32	Kantor Camat Boronadu	10	1	11
33	Kantor Camat Fanayama	17	2	19
34	Kantor Camat Gomo	22	2	24
35	Kantor Camat Hibala	14	2	16
36	Kantor Camat Hilimegai	13	3	16
37	Kantor Camat Hilisalawa'ahe	15	0	15
38	Kantor Camat Huruna	21	0	21
39	Kantor Camat Idanotae	11	0	11
40	Kantor Camat Lahusa	18	6	24
41	Kantor Camat Lolomatua	13	1	14
42	Kantor Camat Lolowau	23	2	25
43	Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	13	3	16
44	Kantor Camat Maniamolo	13	3	16
45	Kantor Camat Mazino	11	1	12
46	Kantor Camat Mazo	13	2	15
47	Kantor Camat Onohazumba	15	1	16
48	Kantor Camat Onolalu	13	0	13
49	Kantor Camat O'ou	13	0	13
50	Kantor Camat PP. Batu	34	9	43
51	Kantor Camat PP. Batu Barat	15	1	16
52	Kantor Camat PP. Batu Utara	16	1	17
53	Kantor Camat PP. Batu Timur	8	2	10
54	Kantor Camat Sidua'ori	17	0	17
55	Kantor Camat Simuk	11	0	11
56	Kantor Camat Somambawa	14	0	14
57	Kantor Camat Susua	13	0	13
58	Kantor Camat Tanah Masa	10	0	10
59	Kantor Camat Telukdalam	19	15	34
60	Kantor Camat Toma	20	2	22
61	Kantor Camat Uluidanotae	12	0	12
62	Kantor Camat Ulunoyo	14	1	15
63	Kantor Camat Ulususua	12	0	12
64	Kantor Camat Umbunasi	14	1	15
65	PNS GGD	133	255	513
66	PNSD Kesehatan	3	241	244
Total		2.363	1.705	4.068

Sumber data: BKD Kabupaten Nias Selatan, 2021

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Proses pembangunan sangat bergantung pada apa yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai modal dalam menyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai



permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut, baik yang telah dan tengah berlangsung ataupun permasalahan yang dapat terjadi di masa yang akan datang harus diidentifikasi.

Secara umum permasalahan yang ada dan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada saat ini setelah dilakukan identifikasi baik melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan yaitu masih rendahnya kualitas pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah serta kurangnya sarana dan prasarana transportasi (darat, laut dan udara), belum terpenuhinya pasokan energi dan air bersih, rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum terkelolanya sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal, masih rendahnya kultur pemerintah yang bersih dan melayani, belum terkelolanya lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang baik, kondisi wilayah yang rawan dengan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor, permasalahan sosial budaya menyangkut konflik hutan dan lahan, keterbelakangan dan budaya masyarakat yang kurang tertib, kurang disiplin, malas dan temperamental, kurangnya partisipasi swasta (investor) dalam pengembangan ekonomi wilayah serta minimnya regulasi yang memadai.

Untuk melihat secara rinci permasalahan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan Urusan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Salah satu permasalahan dalam urusan pelayanan dasar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sekarang ini adalah permasalahan di bidang pendidikan.



Pendidikan merupakan bidang penting dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal yang paling penting dalam pembangunan suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang harus segera di atas oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 hanya 5,2 tahun atau rata-rata mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Data lain menunjukkan bahwa ijazah kebanyakan yang dimiliki oleh masyarakat yang sedang/pernah bersekolah di Kabupaten Nias Selatan adalah ijazah sekolah dasar yaitu sekitar 11,27%.

Selain permasalahan di atas, masalah lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bidang pendidikan adalah masih rendahnya pelayanan pendidikan yang tercermin dari rendahnya angka partisipasi sekolah.

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam bidang pendidikan adalah masih rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara, Kabupaten Nias Selatan sangat membutuhkan tenaga-tenaga level SMA/SMK yang mampu mengembangkan sektor perikanan, pariwisata dan pertanian. Jadi, yang menjadi tantangan pembangunan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan SMK.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian untuk dipecahkan dalam rangka peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan adalah masih adanya disparitas mutu pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta,



rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah, belum maksimalnya *output* pembelajaran dan belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

b. Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Nias Selatan juga masih sangat rendah. Masalah-masalah tersebut seperti keterbatasan jumlah rumah sakit umum, Puskesmas Pembantu, dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga medis (perawat). Di samping itu juga masalah yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti laboratorium kesehatan, apotik dan perlengkapan medis lain. Masalah lainnya adalah belum sadarnya masyarakat akan kesehatan dan pengobatan kedokteran, sebagian besar masyarakatnya dalam mengatasi kesehatan masih percaya dengan dukun, masih ditemukannya balita gizi buruk, masih tingginya endemis DBD, masih tingginya penderita penyakit menular, masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan, fasilitas dan perlengkapan kesehatan puskesmas belum merata (termasuk didalamnya penempatan tenaga kesehatan). Banyak tenaga kesehatan berlebih jika dilihat dari rasio pelayanan, di satu sisi masih banyak tenaga kesehatan yang kurang bahkan tidak ada.

Permasalahan lain pembangunan di bidang kesehatan antara lain belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala, belum optimalnya deteksi dini secara berjalan status kesehatan pada kelompok rawan, belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan dan belum



optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan.

Selain masalah-masalah tersebut di atas, masalah paling utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam bidang pekerjaan umum dan tata ruang, permasalahan yang harus dihadapi adalah urusan pengelolaan air minum, jalan, jembatan, dan infrastruktur seperti gedung, drainase dan lain-lain. Infrastruktur daerah merupakan prasyarat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau (wilayah kepulauan) masih sangat membutuhkan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta sarana prasarana transportasi, baik transportasi darat, laut maupun transportasi udara.

Selain itu, permasalahan lain adalah kurangnya pasokan air bersih. Sebagian besar penduduk Kabupaten Nias Selatan masih menggunakan air tanah dengan membuat sumur sendiri atau menggunakan air sungai sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan air.

Secara rinci masalah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan adalah:

- a. Belum terintegrasinya infrastruktur antara sentra produksi dengan pusat perdagangan.



- b. Belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
- c. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan.
- d. Masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis.
- e. Masih kurangnya moda transportasi perairan.
- f. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum masih belum merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah kurangnya regulasi yang mengatur tentang sistem penggalian bahan golongan C. Seperti diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang bekerja sebagai buruh penggalian bahan golongan C melakukan penggalian disekitaran sungai yang berdekatan dengan jalan raya yang selanjutnya akan berdampak pada keberlangsungan masa pakai dari jalan raya itu sendiri.

Selain itu, permasalahan pembangunan bidang urusan penataan ruang, antara lain belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan, belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh dan belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.



d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah-masalah penting dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah penanganan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal. Sampah B3 (RS) dan Umum (perumahan) tercampur (tidak terpilah), belum adanya regulasi atau Peraturan Daerah pengelolaan sampah yang diterbitkan, termasuk masalah tempat pembuangan akhir (TPA), sampah B3 dan tempat pembuangan sementara dan unit pengelolaan sampah, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah, banyak masyarakat yang melakukan konversi di kawasan hutan, sementara banyak daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan kekurangan sumber air bersih, sumber-sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pasokan air bersih atau air baku, sanitasi belum memadai, masih terdapat rumah yang tidak layak huni, kerusakan lingkungan pesisir disebabkan oleh alam yaitu abrasi pantai, kerusakan lingkungan pesisir akibat ulah manusia seperti penambangan pasir dan karang yang tidak terkontrol, masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan, masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas dalam lingkungan perumahan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, masih banyak usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan sosial budaya yang terjadi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum selama ini



antara lain menyangkut konflik lahan, budaya masyarakat yang kurang tertib, kurang disiplin, malas dan temperamental yang sangat sering menimbulkan konflik antar masyarakat.

Terkait dengan perlindungan masyarakat, permasalahan pembangunan Kabupaten Nias Selatan dihadapkan pada kondisi sebagian besar wilayahnya sangat rawan dengan bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir rob dan gelombang pasang di wilayah pesisir. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini. Mitigasi bencana perlu menjadi prioritas pembangunan seperti identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan bencana, masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Untuk menjamin ketertiban umum perlu ditingkatkan kualitas peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum atas kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain seperti DPRD perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.



f. Bidang Sosial

Rendahnya kualitas sumber daya manusia, berkorelasi secara signifikan terhadap angka pengangguran, tumbuhnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya masalah sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (Pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna Narkoba, pengemis dan gelandangan).

Permasalahan pembangunan bidang urusan sosial, antara lain masih tingginya jumlah PMKS, belum optimalnya penanganan PMKS, masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial dan masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

2. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketenagakerjaan, antara lain masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja, masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja, belum terpetakannya ketenagakerjaan dan kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan serta sulitnya mencari tenaga terampil di bidang pertanian dan perkebunan.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara



lain masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan, masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketahanan pangan, antara lain beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman, masih tingginya angka konsumsi beras per kapita, cadangan pangan, terutama beras masih rendah, dan masih rendahnya penerapan pola pangan harapan (PPH) serta produktivitas tanaman padi per hektare masih rendah yakni sekitar rata-rata 2.5 sampai 3 ton per hektar.

d. Bidang Pertanahan

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanahan, antara lain masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat, belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain, masih belum tersedianya data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi mengenai pertanahan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup, antara lain masih tingginya eksploitasi sumber daya alam, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan



lingkungan, masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/atau usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan dan masih banyak usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, masih rendahnya perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, masih adanya keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima dan lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan, masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat dan kurang optimalnya kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.



h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain masih rendahnya MOP dan banyaknya *unmet need*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda, berkurangnya tenaga lini lapangan, belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat, masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas, masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS dan belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

i. Bidang Perhubungan

Permasalahan bidang urusan perhubungan Kabupaten Nias Selatan, antara lain rendahnya kuantitas dan kualitas angkutan jalan raya, baik angkutan dari kecamatan ke desa maupun antar desa serta angkutan antar kota ke kabupaten lain, rendahnya kesadaran dan disiplin berlalu lintas di jalan raya, belum adanya rencana induk angkutan penumpang di Kabupaten Nias Selatan, terbatasnya/ masih kurangnya transportasi laut antar pulau, dan masih belum adanya angkutan udara ke Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan, Kota Teluk Dalam.

j. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, antara lain terbatasnya sumber daya aparatur di bidang layanan komunikasi dan informatika, belum optimalnya pemanfaatan teknologi



informasi komunikasi secara tepat guna dan masih terbatasnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi.

k. Bidang Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan bidang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah, masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM, masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa, masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar, belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM, kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar provinsi maupun nasional dan masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

l. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan bidang urusan penanaman modal, antara lain masih rendahnya promosi potensi investasi daerah, belumnya adanya insentif dan dis-insentif investasi, belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah, masih rendahnya iklim investasi, masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi dan belum berfungsinya secara optimal pelayanan melalui PTSP.

m. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga, antara lain masih rendahnya



kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi olahraga, masih kurangnya pergerakan potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat, masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan, masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga dan masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

n. Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan bidang urusan statistik, antara lain masih adanya data dan informasi mengenai pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian yang tidak sinkron antara perangkat daerah dengan data dan informasi yang disajikan oleh BPS dan masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

o. Bidang Persandian

Permasalahan bidang urusan persandian yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nias Selatan antara lain rendahnya kualitas pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Nisa Selatan dan belum adanya penetapan standar komunikasi sandi antar perangkat daerah.

p. Bidang Kebudayaan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kebudayaan, antara lain kurang terpromosikannya budaya lokal, kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif, kurangnya pemeliharaan



benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

q. Bidang Perpustakaan

Permasalahan pembangunan bidang urusan perpustakaan, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat teradap pentingnya perpustakaan, masih rendahnya minat baca masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan, terbatasnya kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur dalam mengelola perpustakaan dan belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.

r. Bidang Kearsipan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kearsipan, antara lain kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan.

3. Permasalahan Urusan Pilihan

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Nias Selatan memiliki wilayah laut yang luas dan pantai yang panjang. Potensi sektor perikanan dan pariwisata laut merupakan modal pembangunan yang penting dari sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan. Potensi wisata laut dari keindahan wilayah pantai dan olah raga selancar (*surfing*) yang sudah dikenal di manca negara namun belum dikelola dengan baik, sehingga saat ini jumlah



wisatawan manca negara yang berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan kurang meningkat.

Permasalahan pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan antara lain rendahnya sumber daya manusia dibidang perikanan, kurangnya penerapan teknologi perikanan, kurangnya akses permodalan, kurang optimalnya kelembagaan perikanan, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perikanan, rendahnya alokasi pagu anggaran untuk bidang kelautan dan perikanan dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

b. Bidang Pariwisata

Potensi yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik adalah warisan budaya yang mempunyai nilai historis kultural yakni rumah adat Kabupaten Nias Selatan dan budaya lompat batu. Jika hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, maka dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan ekonomi Kabupaten Nias Selatan, karena sektor pariwisata mempunyai *multiplier effect* yang tinggi. Oleh karena itulah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya Kabupaten Nias Selatan secara optimal adalah hal utama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini adalah permasalahan pariwisata yang terkait dengan bidang pariwisata yaitu masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya, kurang terpromosikannya budaya lokal, kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif,



kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional, belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi, kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya, belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata, belum optimalnya promosi objek wisata, kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata, dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

c. Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanian, antara lain penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian, terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian, masih lemahnya sistem alih teknologi, terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan, masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi, kemampuan SDM petani masih rendah, rendahnya penerapan teknologi peternakan serba guna, rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi, turunnya populasi ternak serta masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

d. Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kehutanan, antara lain masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam dan masih adanya konflik dalam pemanfaatan lahan dan hutan.



e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasokan energi listrik merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak semua desa menikmati arus listrik dari PLN. Dari 461 desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan, masih terdapat beberapa desa lagi yang belum tersentuh jaringan listrik yang bersumber dari PLN. Hal ini merupakan salah satu sektor yang terus-menerus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

f. Bidang Perdagangan

Permasalahan merosotnya daya beli akibat turunnya harga komoditi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Kabupaten Nias Selatan, seperti turunnya harga karet dan komoditi perkebunan lainnya. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu menyikapi hal ini dengan memfasilitasi tata niaga komoditi-komoditi pertanian dan perkebunan serta memberikan informasi harga produk-produk perkebunan dan pertanian.

Permasalahan lain yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan terkait bidang perdagangan adalah masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar dipusat-pusat kota maupun pasar desa, belum terumuskannya kebijakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir, kurang memadainya kualitas sumber daya manusia, pengawasan bidang ekspor/impor masih lemah, dan belum sinkronnya regulasi tentang PKL dengan kondisi di lapangan.

g. Bidang Perindustrian

Permasalahan pembangunan bidang urusan perindustrian, antara lain masih lemahnya budaya



industri, belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri, masih belum tersedianya bahan baku lokal yang mencukupi, kurangnya informasi akses permodalan, inovasi produk masih rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi dan kualitas produk belum memenuhi standar serta rendahnya investasi swasta pada sektor industri.

h. Bidang Transmigrasi

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketransmigrasian, antara lain kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi dan kurangnya sosialisasi transmigrasi kepada masyarakat.

E. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan



cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 mencakup hal-hal berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sekaligus bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021;
2. Aspek manajemen kerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

F. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ini adalah:



1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

G. Sistematika Panyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun sebelumnya diperbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum diantaranya latar belakang, gambaran umum Kabupaten Nias Selatan, kondisi umum Kabupaten Nias Selatan, permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan LAKIP tahun 2021 dan Sistematika LAKIP Tahun 2021.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja tahun 2021, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, Perencanaan Anggaran Tahun 2021 dan Perencanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya mendasari hasil evaluasi seluruh pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan mana saja yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, yang merupakan pedoman operasional pembangunan, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1. Visi

Langkah awal dalam menentukan arah dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis atas cara pandang jauh kedepan kemana organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.



Agar mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Atas dasar pengertian sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk tahun 2016-2021 visi Kabupaten Nias Selatan adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat dan Cerdas
Dengan Kepemimpinan Yang Melayani
Jujur dan Sederhana”**

Makna yang terkandung di dalam visi Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat;
- b. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan berkesinambungan;
- c. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu berpikir dan bekerja kreatif, inovatif dan terampil sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baru dan besar sesuai dengan perkembangan zaman;



- d. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang selalu hadir untuk mendengar, memahami dan bekerja keras dengan tulus untuk memenuhi harapan masyarakat;
- e. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang ucapan dan perbuatannya selalu seiring sejalan, mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab; dan
- f. Pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang rendah hati dan memiliki empati serta peduli pada kondisi masyarakat.

2. Misi

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan/diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi yang bersangkutan. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Sejalan dengan itu, maka misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, dalam periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju, sehat, dan cerdas. Usaha-usaha dalam perwujudan visi Kabupaten Nias Selatan akan dijabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 yang disebut “**SIWA**



SANUWU SIHONO” (Sembilan Program Prioritas) sebagai berikut:

- a. Membangun kultur pemerintah yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
- b. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;
- c. Menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
- d. Menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
- e. Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan;
- f. Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan investor;
- g. Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan kebudayaan;
- h. Membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman; dan
- i. Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 20 (dua puluh) tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2016-2021, yaitu:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan;
- b. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan;



- c. Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempermudah akses masyarakat pada pelayanan kesehatan;
- f. Membangun sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan murah;
- g. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada pendidikan wajib 9 tahun (pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan);
- h. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan kapasitas pendidikan masyarakat;
- i. Peningkatan sistem tata kelola pendidikan;
- j. Mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan sekaligus penyangga perekonomian;
- k. Mewujudkan kemandirian pangan daerah;
- l. Mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- m. Meningkatkan daya tarik investasi usaha dan pendapatan;
- n. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- o. Memperkuat dan menumbuhkembangkan alternatif perekonomian berbasis perikanan dan kelautan;
- p. Memperkuat dan menumbuhkembangkan alternatif perekonomian baru berbasis pemanfaatan sumber daya lahan lokal;
- q. Meningkatkan pariwisata berbasis sumber daya alam dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- r. Mewujudkan generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman;
- s. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat; dan



- t. Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat.

4. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab;
- b. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- c. Terlayannya kepentingan oleh aparaturnya pemerintah;
- d. Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan;
- e. Meningkatkan akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten;
- f. Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum;
- g. Berkurangnya angka kematian penduduk;
- h. Tersedianya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
- i. Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional, sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata;
- j. Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat yang akuntabel dan efisien;
- k. Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah;
- l. Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khusus, khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
- m. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;



- n. Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- o. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja dinas pendidikan;
- p. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah;
- q. Tercapainya produksi pertanian lokal yang mempunyai kualitas dan harga yang lebih kompetitif;
- r. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian;
- s. Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian;
- t. Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha;
- u. Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- v. Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur;
- w. Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan;
- x. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- y. Terciptanya kemudahan dan kepastian investasi;
- z. Meningkatnya investasi usaha;
- aa. Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat;
- bb. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan;
- cc. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumberdaya lahan;
- dd. Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata;
- ee. Meningkatnya kunjungan wisatawan;



- ff. Meningkatnya peran serta *stakeholder* di dalam pengembangan kepariwisataan;
- gg. Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan berprestasi;
- hh. Membentuk generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia;
- ii. Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat;
- jj. Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam;
- kk. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman;
- ll. Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- mm. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; dan
- nn. Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup



outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Beberapa tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menjadi tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Dasar monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja pemerintah; dan
5. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.

Penetapan Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif dan akuntabel. Adapun penetapan kinerja adalah merupakan hasil dari indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 : Membangun Kultur Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab	Nilai SAKIP	CC
		Nilai LPPD	ST
		Opini BPK	WTP
		Indeks Daya Saing Daerah	Sedang
2	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	90%
3	Terlayannya kepentingan oleh aparatur pemerintah	Indeks Profesionalisme ASN	Sedang
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa			
4	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Perdesaan	Persentase Infrastruktur Pedesaan dalam kondisi baik	65%
5	Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan Dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	90%
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	4,7%
6	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar/Umum	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%
		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		Persentase menurunnya penduduk miskin	16,24%
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
7	Berkurangnya Angka Kematian Penduduk	Angka Harapan Hidup	68,75



8	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau	Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,12/1.000
9	Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Profesional Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Terdistribusi Merata	Rasio dokter yang tersedia	0,20
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
10	Tercapainya Kewajiban Sekolah Pendidikan Dasar (9 Tahun) Bagi Penduduk Usia Sekolah	Angka Melek Huruf	62,14%
11	Meningkatnya Layanan Pendidikan Bagi Kelompok Masyarakat Khusus, Khususnya Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu	Angka Putus Sekolah Dasar	703
		Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	295
12	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Lembaga Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi	720 lembaga
13	Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	20%
14	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja dinas pendidikan	Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	69,26%
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan			
15	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,49 %
16	Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan	50 UMKM
17	Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan	Skor PPH Kabupaten Nias Selatan	77,96



18	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam kondisi baik	70%
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor			
19	Terciptanya kemudahan dan kepastian investasi	Jumlah ijin usaha IRT dan UKM yang diterbitkan	1000 Dokumen
20	Meningkatnya investasi usaha	Jumlah investor berskala nasional	3 Investor
21	Berkembangnya Ekonomi Usaha Lokal Yang Menyerap Tenaga Kerja Setempat	Persentase menurunnya angka pengangguran	4%
22	Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru Dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Perikanan Dan Kelautan	Persentase pertumbuhan PDB sektor perikanan	6,1%
23	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumber daya lahan	Persentase koperasi aktif	100%
Misi 7 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Kebudayaan			
24	Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	4,5%
25	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	12.000 orang
26	Meningkatnya peran serta stakeholder di dalam pengembangan kepariwisataan	Jumlah investasi bidang kepariwisataan	500 Juta
Misi 8 : Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter, Berbudaya dan Beriman			
27	Terbentuknya Generasi Muda Yang Kreatif, Inovatif, Terampil Dan Berprestasi	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	5%
28	Membentuknya generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi	3%



Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

29	Terciptanya Suasana Dan Kondisi Yang Kondusif Di Tengah Masyarakat	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	72%
		Persentase penanganan konflik sosial, agama dan terorisme	80%
30	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Persentase masyarakat yang tanggap bencana	75%
31	Terciptanya Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman	Indeks kualitas lingkungan hidup	74
32	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Dan Terkendalinya Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	85
33	Terciptanya Lingkungan Yang Nyaman Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik	Indeks mutu air minum	65
		Rasio Rumah Layak Huni	0,25
33	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kehidupan (Listrik Dan Air Bersih) Yang Cukup	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	87,89%

Sumber data: Bagian Organisasi & RB Sekretariat Daerah, 2021

Seiring dengan masih mewabahnya virus Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan secara khusus yang memerlukan penanganan lebih serius, alokasi anggaran untuk pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan harus disesuaikan dengan menitikberatkan pada anggaran penanganan virus dimaksud, sehingga target-target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan juga mengalami penyesuaian seperti tampak pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 : Membangun Kultur Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab	Nilai SAKIP	CC
		Nilai LPPD	ST
		Opini BPK	WTP
2	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	51%
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa			
3	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Perdesaan	Persentase Infrastruktur Pedesaan dalam kondisi baik	65%
4	Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan Dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	90%
		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	4,7%
5	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar/Umum	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	80%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
6	Berkurangnya Angka Kematian Penduduk	Angka Harapan Hidup	68,75
7	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,12 / 1000
8	Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Profesional Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Terdistribusi Merata	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,20
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
9	Tercapainya Kewajiban Sekolah Pendidikan Dasar (9	Angka Melek Huruf (AMH)	62,14%



	Tahun) Bagi Penduduk Usia Sekolah		
10	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Lembaga Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi	720 Lembaga
11	Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	20%
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan			
12	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,49%
13	Tersedianya Akses Bagi Petani Dalam Memperoleh Modal Usaha	Jumlah UMKM Yang Mendapatkan Bantuan Permodalan	50 UMKM
14	Tersedianya Data Informasi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan	Skor PPH Kabupaten Nias Selatan	77,96
15	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam kondisi baik	70%
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor			
16	Meningkatnya Investasi Usaha	Jumlah Investor berskala Nasional	3 Investor
17	Berkembangnya Ekonomi Usaha Lokal Yang Menyerap Tenaga Kerja Setempat	Persentase menurunnya angka pengangguran	4%
18	Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru Dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Perikanan Dan Kelautan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	6,1%
19	Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru Dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Sumber Daya Lahan	Persentase Koperasi Aktif	100%
Misi 7 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Kebudayaan			
20	Meningkatnya Usaha Yang Terkait Dengan Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	4,5%
21	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	12.000 Orang
Misi 8 : Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter, Berbudaya dan Beriman			
22	Terbentuknya Generasi Muda Yang Kreatif, Inovatif, Terampil Dan Berprestasi	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	5%



23	Membentuknya generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Berprestasi	3%
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
24	Terciptanya Suasana Dan Kondisi Yang Kondusif Di Tengah Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%
		Persentase penanganan konflik sosial, agama dan terorisme	80%
25	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Persentase Masyarakat Yang Tanggap Bencana	75%
26	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Dan Terkendalinya Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	86,58
27	Terciptanya Lingkungan Yang Nyaman Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik	Indeks Mutu Air Minum	51,11
		Rasio Rumah Layak Huni	0,25
28	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kehidupan (Listrik Dan Air Bersih) Yang Cukup	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	87,89%

Sumber data: Bagian Organisasi & RB Sekretariat Daerah, 2021

C. Perencanaan Anggaran

Dalam upaya pencapaian visi dan misi melalui penetapan perjanjian kinerja tahun 2021, alokasi anggaran dan program pendukung Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perencanaan Anggaran
Kabupaten Nias Selatan T.A. 2021

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	501.367.044.462
2	Program Pengelolaan Pendidikan	209.187.979.090
3	Program Pengembangan Kurikulum	44.977.660
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	142.731.363.471



5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.977.986.870
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.475.800
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	15.328.296.500
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.846.489.396
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.287.783.000
10	Program Penataan Bangunan Gedung	10.910.785.804
11	Program Penyelenggaraan Jalan	92.137.803.855
12	Program Kawasan Permukiman	52.887.070
13	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.613.770.700
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	141.561.000
15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	275.300.000
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	72.400.000
17	Program Penanggulangan Bencana	4.903.064.583
18	Program Pemberdayaan Sosial	1.622.767.595
19	Program Rehabilitasi Sosial	1.047.489.100
20	Program Penanganan Bencana	90.530.000
21	Program Perencanaan Tenaga Kerja	50.085.300
22	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	297.574.400
23	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	108.202.920
24	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	82.088.700
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	181.039.700
26	Program Pengembangan UMKM	115.563.800
27	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.423.246.900



28	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	879.700.000
29	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	703.431.160
30	Program Pengawasan Keamanan Pangan	75.518.630
31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	353.530.000
32	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	859.091.000
33	Program Pengelolaan Persampahan	3.297.153.600
34	Program Pendaftaran Penduduk	1.260.142.640
35	Program Pencatatan Sipil	577.031.300
36	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340.523.660
37	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.209.400
38	Program Administrasi Pemerintahan Desa	838.642.800
39	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	575.922.900
40	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.217.471.070
41	Program Pengelolaan Pelayaran	8.894.107.305
42	Program Informasi dan Komunikasi Publik	969.301.295
43	Program Aplikasi Informatika	1.994.871.138
44	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	420.534.600
45	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	184.729.515
46	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	69.998.000
47	Program Promosi Penanaman Modal	40.000.100
48	Program Pelayanan Penanaman Modal	49.998.900
49	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	370.982.000
50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	465.594.500
51	Program Pengembangan Kebudayaan	3.297.996.450



52	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	11.518.251.105
53	Program Pemasarana Pariwisata	362.800.800
54	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	862.576.125
55	Program Pembinaan Perpustakaan	63.513.100
56	Program Pengelolaan Ikan Tangkap	1.714.670.990
57	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.016.363.300
58	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	75.420.420
59	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.203.633.750
60	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.548.635.000
61	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	73.793.800
62	Program Penyuluhan Pertanian	205.000.000
63	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	468.535.085
64	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90.431.305
65	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	130.103.358
66	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.617.921.840
67	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.795.528.790
68	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.711.228.040
69	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.124.168.290
70	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	888.231.135
71	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	160.508.380
72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	492.997.853.640
73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	693.497.400
74	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	883.021.540
75	Program Kepegawaian Daerah	1.336.804.340



76	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.983.296.300
77	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	268.177.000
78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	550.697.480
79	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1.075.006.340
80	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.534.434.592
81	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	243.789.205
82	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	15.840.830
83	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.300.000.000
84	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	23.622.885
85	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000
86	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	23.296.000
Total Anggaran		1.618.153.691.804

Sumber data: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, 2021

Seiring dengan masih mewabahnya Virus Covid-19 yang juga berdampak di Kabupaten Nias Selatan, arah kebijakan penganggaran selama tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan Covid-19, sehingga perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.



Adapun perubahan perencanaan anggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perencanaan Anggaran Perubahan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.946.985.990
2	Program Pengelolaan Pendidikan	166.572.851.227
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	183.420.080.311
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.127.989.470
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.137.344.950
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	14.783.820.092
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.643.554.972
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.568.181.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	10.089.803.155
10	Program Penyelenggaraan Jalan	86.558.809.341
11	Program Kawasan Permukiman	2.654.016.300
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	141.561.000
13	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	152.170.000
14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	23.875.000
15	Program Penanggulangan Bencana	4.832.854.583
16	Program Pemberdayaan Sosial	459.194.495
17	Program Rehabilitasi Sosial	15.000.000
18	Program Penanganan Bencana	313.479.000
19	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49.473.210
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.649.900
21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	108.202.920
22	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	82.088.700
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	82.088.500
24	Program Pengembangan UMKM	267.923.880



25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.212.800.000
26	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.147.206.850
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	879.700.000
28	Program Pengawasan Keamanan Pangan	248.523.512
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	353.530.000
30	Program Pengelolaan Persampahan	209.911.000
31	Program Pendaftaran Penduduk	2.678.554.600
32	Program Pencatatan Sipil	47.550.000
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	311.624.200
34	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	478.023.040
35	Program Pengelolaan Pelayaran	1.089.393.400
36	Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.450.463.865
37	Program Aplikasi Informatika	565.346.000
38	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.152.933.600
39	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	107.330.300
40	Program Promosi Penanaman Modal	27.520.000
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.961.600
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15.815.000
43	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	723.376.500
44	Program Pengembangan Kebudayaan	708.868.250
45	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	11.280.573.571
46	Program Pemasarana Pariwisata	70.919.695
47	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	616.127.144
48	Program Pembinaan Perpustakaan	50.620.000
49	Program Pengelolaan Ikan Tangkap	1.699.047.990
50	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.270.000
51	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	54.980.000
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.961.179.670
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.094.986.247
54	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79.671.700



55	Program Penyuluhan Pertanian	205.000.000
56	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.351.380
57	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18.369.115
58	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.213.000
59	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.812.369.589
60	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.744.602.825
61	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	34.711.908.408
62	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.000.784.980
63	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	640.444.880
64	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.186.380
65	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	488.002.404.300
66	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	681.272.900
67	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	669.295.540
68	Program Kepegawaian Daerah	1.241.037.070
69	Program Penyelenggaraan Pengawasan	278.529.700
70	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	31.500.000
71	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	360.922.420
72	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	97.471.150
73	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	584.263.457
74	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	124.126.710
75	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.065.240
76	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.497.229.930
77	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.380.925
78	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	37.866.000
79	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.145.000
Total Anggaran		1.549.477.546.629

Sumber data: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, 2021



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai pihak pemegang amanah masyarakat, berkewajiban memberikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini, Kabupaten Nias Selatan mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, analisis akuntabilitas kinerja dinilai berdasarkan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai usaha perwujudan *Good Governance* untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan asaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, laporan keuangan perangkat daerah/laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya.
2. Data Eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang masih relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, khususnya data-data yang bersumber dari hasil perhitungan BPS Kabupaten Nias.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai yang termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Interprestasi Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Capaian (%)	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal



4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber data: Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi-informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan yang merupakan indikator-indikator kunci dari masing-masing indikator organisasi perangkat daerah. Sehingga analisis capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 didasarkan pada capaian dari masing-masing perangkat daerah yang membidangi.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja dimaksud adalah membandingkan target dan realisasi dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021.

Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ **Misi 1**

“Membangun Kultur Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan”

Kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan merupakan satu salah satu aspek yang menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan hal tersebut dapat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang memadai.

Pada tahun 2021, untuk mewujudkan misi membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021. Adapun pengukuran capaian indikator-indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

❖ Sasaran Strategis 1

Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 1 : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan					
1	Mewujudkan Pemerintahan	Nilai SAKIP	CC	C	37,2



Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggung- jawab	Nilai LPPD	ST	-	
	Opini BPK	WTP	WDP	Opini LK Tahun 2020

Sumber data: LAKIP Setda dan LAKIP BPKPAD Tahun 2021.

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 1 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan target kinerja “Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah” dengan nilai CC. Namun berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, realisasi nilai evaluasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 belum diperoleh. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan hanya mencapai nilai 37,36 dengan predikat nilai C. Artinya capaian kinerja nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut belum memenuhi target.

Berdasarkan data hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara umum bahwa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh pembangunan budaya kerja, kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah



Kabupaten Nias Selatan belum berjalan baik dan memerlukan perbaikan mendasar.

Untuk meningkatkan penerapan AKIP di Kabupaten Nias Selatan, beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil/outcome serta memastikan bahwa indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal.
- Menyempurnakan perjanjian kinerja di tingkat Perangkat Daerah sampai ke level paling rendah secara berjenjang sebagai penjabaran dari sasaran kinerja tingkat daerah.
- Menyusun rencana aksi sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah dengan menentukan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja organisasi maupun individu dan sebagai alat untuk pengendalian kinerja.
- Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan serta memastikan bahwa laporan kinerja diserahkan secara tepat waktu.
- Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk



mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan penerapan AKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun-tahun berikutnya, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab dan melaksanakan beberapa rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seperti yang diuraikan di atas.

2. Nilai LPPD

Untuk mendukung dan mewujudkan sasaran strategis 1 di atas, indikator kinerja yang perlu dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selain dari sisi akuntabilitas kinerja adalah Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan kepada pemerintah, untuk selanjutnya akan dievaluasi oleh Tim Penilai LPPD baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi.

Untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, Nilai LPPD merupakan salah satu indikator kunci yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan menetapkan target kinerja Nilai LPPD Kabupaten Nias Selatan dengan kategori “Sangat Tinggi”. Untuk diketahui bahwa hasil penilaian atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 tersebut baru akan dikeluarkan sampai dengan akhir semester I tahun 2022. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun



sebelumnya bahwa nilai evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Dalam mewujudkan sasaran strategis 1 di atas, selain indikator kinerja “Nilai SAKIP” dan “Nilai LPPD”, indikator kinerja “Opini BPK” terhadap laporan keuangan daerah juga merupakan salah satu unsur yang terus dipacu pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 1, dapat diketahui bahwa Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 baru akan disampaikan pada awal triwulan II tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja “Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah” Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, dari target WDP dapat terealisasi dengan nilai opini “WDP” dengan tingkat capaian capaian 100%.

Secara umum keberhasilan pencapaian target kinerja “Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah” Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 dengan capaian *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* disebabkan oleh laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan disajikan secara wajar dalam semua hal material (terutama bahwa bukti pemeriksaan yang diperoleh oleh BPK adalah cukup dan tepat), posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 31 Desember 2020, realiasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang



berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

❖ Sasaran Strategis 2

Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
Mewujudkan Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 1 : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan					
1	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	-	-
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	51%	75%	147%

Sumber data: LAKIP Dinas Dukcapil, 2021.

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 2 di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik



sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan dan melaksanakan amanat undang-undang tersebut, indikator kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” sebesar 75 point. Namun selama tahun 2021, penilaian atas indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tersebut belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19 yang melanda negara Republik Indonesia dan termasuk wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Namun berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, nilai kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan masih berada di Zona Merah dengan rentang nilai dari 0-30 point. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat memerlukan perhatian yang lebih serius.

2. Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

Selain indikator kinerja 1 di atas, untuk mewujudkan sasaran strategis 2 tersebut, indikator kinerja “Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan” merupakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan ditargetkan sebesar 51% penduduk diwilayah Kabupaten Nias Selatan sudah memiliki dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil dari laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan yang sudah memiliki dokumen kependudukan sudah mencapai 75%. Artinya dari total penduduk Kabupaten Nias Selatan sejumlah 360.531 jiwa, 270.398 jiwa sudah memiliki dokumen kependudukan. Dari target yang ditentukan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mencapai 147%.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut terlaksana melalui penggalakkan dan pemberian motivasi dan dorongan kepada seluruh masyarakat melalui Pemerintahan Desa akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan oleh setiap warga khususnya di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis elektronik. Yang mana setiap warga di Kabupaten Nias Selatan yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak harus datang ke instansi/kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan pengurusan dokumen kependudukannya



bisa dilaksanakan menggunakan telepon selular sejauh sudah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan.

➤ **Misi 2**

“Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa”

Pola pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan di wilayah pedesaan diprioritaskan untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan bagi wilayah perkotaan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah kabupaten Nias Selatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Adapun pengukuran sasaran dan indikator kinerja dalam mencapai misi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 3**

Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Perdesaan

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Perdesaan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa					
1	Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan	Persentase infrastruktur Pedesaan dalam kondisi baik	65%	60%	92%

Sumber data: LAKIP Dinas PMD, 2021



Dari tabel pengukuran sasaran strategis 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik mencapai 60% dari target 65% infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik atau dengan tingkat capaian sebesar 92%. Berdasarkan data dari laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2021, jenis infrastruktur pedesaan yang kondisi fisiknya masih dalam kondisi baik tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Adapun jenis infrastruktur pedesaan tersebut seperti jalan usaha tani dalam bentuk rabat beton, dam parit, tembok penahan tanah dll.

❖ Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa					
1	Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	90%	57,75%	64%
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	4,7%	4,89%	104%

Sumber data: LAKIP Dinas PUPR & Dishub, 2021

Untuk mendukung pencapaian misi pemerataan pembangunan dengan skala prioritas berbasis desa, salah satu indikator yang ditetapkan pencapaiannya adalah persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan persentase menurunnya



angka kecelakaan lalu lintas. Adapun penjelasan dari masing-masing capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 dapat terealisasi 57,75% dari target 90% panjang jalan dalam kondisi baik atau dengan dengan tingkat capaian 64%. Artinya pada tahun 2021, dari target 662 km panjang jalan dalam kondisi baik yang direncanakan, yang terealisasi hanya 456 km. Jika dibandingkan dengan tahun 200, panjang jalan yang dibangun hingga akhir tahun 2020 mencapai 467 km dari target 530 km. Artinya pada tahun anggaran 2021 pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan.

Berikut daftar pembangunan jalan pada tahun 2021 di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 3.6
Pembangunan Jalan Tahun 2021
Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	Lokasi	Volume (Meter)
1	Semenisasi jalan Desa Suka Maju Dusun Solutu	Kecamatan Ulunoyo	180,51 m
2	Pembangunan jalan dari Desa Hiliadulo menuju Desa Umbuasi	Kecamatan Hilisalawahe	290,00 m
3	Lanjutan pengaspalan jalan dari Desa Hilimanawa menuju Desa Hiliuso	Kecamatan Huruna	319,00 m
4	Lanjutan pembangunan jalan dari Hilimboe Kecamatan Susua menuju Kecamatan Ulususua	Kecamatan Ulususua	312,95 m
5	Rehabilitasi jalan dari SD Orahili menuju Desa Sambulu	Kecamatan Ulunoyo	238,00 m
6	Pengaspalan jalan dari Marao menuju Puncak Lolomatua	Kecamatan Lolomatua	153,57 m



7	Pembangunan jalan dari jembatan Ma'u menuju Sisarahili-Sifalago	Kecamatan Huruna	484,83 m
8	Pembangunan jalan dari IbuKota Ulususua menuju Godu	Kecamatan Ulususua	451,00 m
9	Pembangunan menuju jalan dari Hiliwaebu menuju Borowosi	Kecamatan Ulunoyo	330,38 m
10	Lanjutan semenisasi jalan dari Desa Gondria menuju Pelabuhan	Kecamatan Simuk	239,00 m
11	Pembangunan jalan semenisasi dari Halebaluta menuju Desa Bawaorodua	Kecamatan Tanah Masa	195,00 m
12	Semenisasi dari Tambatan Perahu menuju permukiman warga Desa Sibarani	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	600,00 m
13	Pembangunan jalan Simenisasi dari Desa Eho menuju Hilisimaetano	Kecamatan Maniamolo	83,00 m
14	Pembangunan jalan dari Lolowau menuju Lolohowa-Tuho'owo Togizita	Kecamatan LoLowau	638,00 m
15	Pembangunan jalan lingkaran Hilinamazihono	Kecamatan O'ou	300,00 m
16	Peningkatan jalan dari jalan Provinsi menuju SMA/SMP Lapangan Bola Silambo	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	197,00 m
17	Rehabilitasi jalan menuju TPA Soto'o	Kecamatan Maniamolo	500,00 m
18	Pembangunan jalan menuju Kantor Camat	Kecamatan Hilimegai	195,00 m
19	Pmbangunan jalan Semenisasi di jalan Gomo Lingkungan Perumahan Baloho Indah	Kecamatan Telukdalam	134,00 m
20	Pembangunan jalan di Desa Hilisataro menuju Tower	Kecamatan Toma	310,00 m
21	Pembangunan jalan dari TPI menuju Walo	Kecamatan Telukdalam	95,00 m
22	Pembangunan Semenisasi lapangan Mesjid Zamil Ar-Rahman Jalan Imam Bonjol Kel.Pasar Telukdalam	Kecamatan Telukdalam	34,00 m
23	Lanjutan Pembangunan jalan dari Desa Siwalawa menuju Desa Hilimondrege Raya	Kecamatan Fanayama	34,00 m
24	Pembangunan jalan dari Desa Hilifalago menuju Kantor Camat	Kecamatan Onolalu	135,00 m
25	Pembangunan dari SMAN 1 Telukdalam menuju Desa Hilimondregeraya	Kecamatan Onolalu	293,00 m



26	Pembangunan jalan dari Ikhuhele menuju Dermaga Desa Hilitobara	Kecamatan Telukdalam	250,00 m
27	Lanjutan pembangunan jalan di Desa Bawolahusa Doli-Doli menuju Desa Hiliawalawa	Kecamatan Toma	280,00 m
28	Lanjutan pengaspalan jalan dari Sungai Loyo Desa Sifalago Susua menuju Desa Hilirodua	Kecamatan Susua	306,20 m
29	Pembangunan jalan dari Desa Umbusohahau Dusun Salo'o	Kecamatan Siduaori	335,80 m
30	Pembanguna jalan di Desa Hilisimaetano Balaekha	Kecamatan Lahusa	752,75 m
31	Pembangunan jalan menuju Desa Hilialawa	Kecamatan Toma	126,00 m
32	Pembangunan jalan menuju Desa Sifitu Banua	Kecamatan Somambawa	213,00 m
33	Pembanguan jalan dari Kecamatan Idanotae menuju Perbatasan Kabupaten Nias	Kecamatan Idanotae	280,00 m
34	Pembangunan Jalan menuju Uluidanotae	Kecamatan Idanotae	254,00 m
35	Pengaspalan jalan dari Jalan Kabupaten menuju Paroki Roh Kudus Gomo Desa Orahili Gomo	Kecamatan Gomo	451,15 m
36	Pengaspalan jalan di Desa Harenoro	Kecamatan Boronadu	318,80 m
37	Pengerasan jalan di Desa Lewa-Lewa	Kecamatan Boronadu	652,50 m
38	Peningkatan jalan Tafulu	Kecamatan Mazo	245,00 m
39	Simenisasi dari Desa Hiliorahua menuju Desa Hilimboho	Kecamatan Susua	134,40 m
40	Semenisasi dari Simpang jalan Umum menuju Dusun Dua Desa Hilimboe	Kecamatan Susua	174,20 m
41	Semenisasi dari simpang jalan Umum menuju Dusun Satu Desa Hilimboe	Kecamatan Susua	298,30 m
42	Lanjutan Pembangunan jalan/Semenisasi dari jalan Kabupaten Menuju Namosifelendrua	Kecamatan Fanayama	346,70 m
43	Lanjutan pembangunan Jalan Semenisasi di jalan Saonigehe Km.1 Lingkungan Kelurahan Pasar Telukdalam	Kecamatan Telukdalam	180,00 m
44	Lanjutan Semenisasi jalan Tani di Desa Bawonifaoso menuju Walo Green	Kecamatan Telukdalam	203,00 m
45	Pembangunan jalan Baliki	Kecamatan Telukdalam	226,00 m



46	Rehabilitasi jalan dari jalan Kabupaten menuju SMPN 3 Bawomatalua	Kecamatan Fanayama	213,00 m
47	Pembangunan jalan dari jalan Nasional menuju Desa Bawodobara	Kecamatan Fanayama	1.103,00 m
48	Pembangunan jalan dari Jalan Nasional menuju Lala Gatua Pantai Baloho	Kecamatan Telukdalam	288,00 m
49	Pembangunan jalan dari Jalan Negara menuju Desa Hiliasi	Kecamatan Toma	188,00 m
50	Pembangunan jalan menuju Walo Green	Kecamatan Telukdalam	222,23 m
51	Pembangunan jalan semenisasi dari Desa Lumbui menuju Desa Tebolo	Kecamatan Hibala	260,00 m
52	Pengaspalan jalan menuju Rumah Sakit Umum Kab. Nias Selatan di Desa Hiliana'a	Kecamatan Telukdalam	357,90 m
53	Peningkatan jalan dari Hilinamolo Fau menuju Onohondro	Kecamatan Fanayama	254,00 m
54	Semenisasi jalan dari Ujung Jembatan Sialema menuju Desa Baruyu (Jalan Baru)	Kecamatan Hibala	312,00 m
55	Semenisasi jalan dari Desa Hililaja menuju Desa Sebuaasi	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	297,00 m
56	Semenisasi jalan di Losendra	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	260,50 m
57	Rekonstruksi/peningkatan kapasitas Struktur jalan Ehosofayo	Kecamatan Toma	3079,00 m
58	Rekonstruksi/peningkatan kapasitas Struktur jalan Umbunasi	Kecamatan Umbunasi	930,00 m
59	Rekonstruksi/peningkatan kapasitas Struktur jalan Boronadu	Kecamatan Boronadu	2277,00 m
60	Pembangunan jalan Desa Strategis ruas jalan poros Hilisataro Nandisa-Hilifalago	Kecamatan Toma	925,00 m

Sumber data: LAKIP Dinas PUPR, 2021

Selain peningkatan pembangunan jalan, aspek yang lain yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Nias Selatan adalah pembangunan jembatan.

Adapun daftar pembangunan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Daftar Pembangunan Jembatan
Di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Uraian	Lokasi	Volume (Satuan)
1	Rehabilitasi jembatan di Desa Sirofi	Kecamatan Amandraya	1 Unit
2	Pembangunan Duiker Plat antara Dusun Tuhewino dengan Desa Umbuasi	Kecamatan Hilisalawa'ahe	1 Unit
3	Pembangunan Duiker Plat di lingkungan Baloho Indah	Kecamatan Telukdalam	1 Unit
4	Rehabilitasi jembatan Idanolawa di Desa Hilinawalo Mazino	Kecamatan Mazino	1 Unit
5	Pembangunan Duiker Plat di simpang jalan menuju Desa Bawogosali	Kecamatan Maniamolo	1 Unit
6	Pembangunan jembatan di Desa Sifalago Gomo	Kecamatan Boronadu	1 Unit

Sumber data: LAKIP Dinas PUPR Tahun 2021

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2021 adalah:

1. Banyaknya permasalahan lahan setelah kegiatan pembangunan mulai dilaksanakan
2. Pembatasan aktifitas masyarakat yang disebabkan oleh wabah Virus Corona-19
3. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas
4. Keterbatasan fasilitas pendukung yang memadai
5. Harga material yang melonjak pada saat kegiatan fisik dilaksanakan
6. Alat berat yang sering mengalami kerusakan karena faktor umur ekonomis alat serta keterbatasan tenaga mekanik profesional untuk penanganan alat-alat yang rusak ringan.

Oleh sebab itu, untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, maka beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:



1. Adanya surat pembebasan lahan pembangunan berupa surat hibah tanah bersertifikat
2. Pelaksanaan proyek fisik dipercepat sehingga bisa terhindar dari cuaca ekstrim yang menghambat pembangunan
3. Penambahan sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kualitas yang sesuai dengan bidang yang diharapkan
4. Pengembangan kapasitas pegawai yang ada saat ini melalui pendidikan dan pelatihan
5. Penambahan fasilitas kerja pegawai baik fasilitas kantor, laboratorium maupun fasilitas untuk kegiatan lapangan
6. Penambahan unit alat berat dan penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat-alat berat.

2. Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Selain indikator kinerja “persentase panjang jalan dalam kondisi baik”, indikator yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah “Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas”.

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi sebesar 4,89% dari target 4,7% atau dengan tingkat capaian sebesar 104%. Artinya bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Nias Selatan meningkat sebesar 0,19% dari target yang diharapkan.

Tingginya angka kecelakaan ini pada dasarnya disebabkan oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalulintas yang masih rendah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami kegunaan dan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas yang



terjadi selama tahun 2021 di Kabupaten Nias Selatan juga disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak (berlubang dan bergelombang). Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di atas perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan rambu-rambu lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar sehingga masyarakat lebih memahami kegunaan rambu-rambu lalu lintas angkutan jalan raya. Kegiatan sosialisasi ini perlu kerjasama dari berbagai pihak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Kepolisian Resort Nias Selatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, faktor lain yang perlu ditingkatkan adalah dengan menambah rambu-rambu lalu lintas di titik-titik rawan terjadinya kecelakaan sebagai salah satu bentuk peringatan dini bagi masyarakat yang melalui jalur supaya lebih berhati-hati dan dapat terhindar dari kecelakaan

❖ Sasaran Strategis 5

Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar/Umum

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar/Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa					
1	Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	15%	19%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%

Sumber data: LAKIP Dinas Sosial & BPBD, 2021



Untuk mewujudkan pencapaian misi kedua Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, selain indikator persentase infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik, persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, indikator lain yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 5 di atas, dapat dijelaskan capaian dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja “Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya” pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 15% dari target 80% penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah tersebut berupa pemberian santunan kepada panti asuhan dan panti jompo yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Nias Selatan. Adapun santunan-santunan tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort Nias Selatan dan juga dari organisasi kemasyarakatan baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kabupaten Nias Selatan.

2. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Selain indikator kinerja “Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya”, target kinerja lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 adalah



“Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya”.

Dari tabel analisis sasaran strategis 5 di atas, dapat diketahui bahwa persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 100% korban bencana alam dan sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya dari target 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 100% oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa jenis korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya adalah korban kecelakaan karena tenggelam di laut yang pada tahun 2021 terjadi di wilayah Kecamatan Toma, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanayama.

➤ **Misi 3**

“Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku”

Pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Nias Selatan pada dasarnya masih sangat kurang atau rendah. Kabupaten Nias Selatan secara umum masih menghadapi masalah keterbatasan jumlah rumah sakit umum, Puskesmas, dokter umum dan spesialis serta tenaga medis profesional. Selain itu, permasalahan lain yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti laboratorium kesehatan, apotik dan perlengkapan medis lainnya.

Salah satu indikator kualitas pembangunan manusia adalah tingginya kualitas kesehatan. Untuk mencapai kondisi yang ideal, maka dikembangkan pelayanan kesehatan dengan biaya



terjangkau dan tersedia secara cukup sehingga masyarakat dapat mudah memanfaatkannya. Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada standar dan prosedur kesehatan yang berlaku. Untuk dapat mencapai kondisi ini maka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara sistemik yang secara khusus mendukung visi masyarakat yang sehat.

Untuk merealisasikan misi tersebut, maka, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan tiga (tiga) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja serta pengukuran dan analisis dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ Sasaran Strategis 6

Berkurangnya Angka Kematian Penduduk

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6
Berkurangnya Angka Kematian Penduduk

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	Berkurangnya Angka Kematian Penduduk	Angka Harapan Hidup	68,75	68,74	99,9%

Sumber data: BPS Kab. Nisel & LAKIP Dinas Kesehatan, 2021

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis berkurangnya angka kematian penduduk, maka dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator dan target kinerja Angka Harapan Hidup sebesar 68,75.



Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup pada dasarnya akan mencerminkan derajat kesehatan dari suatu wilayah.

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Hidup di wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi sebesar 99,9% atau 68,74 AHH di wilayah Kabupaten Nias Selatan dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 68,75 AHH. Capaian tersebut pada dasarnya terlaksana berkat upaya-upaya yang dilakukan dan terus digalakkan oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dalam memberikan pelayanan, motivasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nias Selatan akan pentingnya hidup sehat. Terlebih-lebih di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terus menggalakkan pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nias Selatan yang sampai dengan tahun 2021 kondisi vaksinasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan sudah mencapai rata-rata 43,9%. Adapun persentase capaian vaksinasi tersebut yaitu Dosis I sebesar 92,8%, Dosis II sebesar 36,24% dan Dosis III sebesar 2,62%. Capaian vaksinasi tersebut belum termasuk dari kegiatan vaksinasi yang difasilitasi oleh beberapa instansi lain seperti Poli Polres Nias Selatan dan Poskes 01.10.08 Teluk Dalam.

❖ Sasaran Strategis 7

Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau



Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7
Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Menunjang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Yang Bermutu dan Terjangkau

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	Tersedianya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	0,12	0,4	100%

Sumber data: LAKIP Dinas Kesehatan, 2021

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu rasio puskesmas per satuan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, capaian indikator kinerja rasio puskesmas dan Pustu per satuan penduduk dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 berjumlah 36 unit dengan jumlah penduduk sebanyak 360.531 jiwa. Rasio Puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Dalam laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dijelaskan bahwa rasio puskesmas penduduk di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dapat tercapai 0,12% dari target 0,20% atau dengan tingkat capaian 60%. Selain itu, untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, jumlah Puskesmas pembantu di Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 adalah 66 unit yang tersebar di beberapa desa di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.



❖ Sasaran Strategis 8

Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Profesional Sesuai Kebutuhan Masyarakat dan Terdistribusi Merata

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8
Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Profesional Sesuai Kebutuhan Masyarakat dan Terdistribusi Merata

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata	Rasio dokter per satuan penduduk	0,20	0,12	60%

Sumber data: LAKIP Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja rasio dokter per satuan penduduk hanya tercapai 0,12% dari target 0,20% atau dengan tingkat capaian 60%.

Berdasarkan data dari laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias selatan dijelaskan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 50 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 360.531 jiwa. Idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 orang penduduk berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2021 adalah 0,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2021 belum memenuhi target.



➤ **Misi 4**

“Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku”

Bidang pendidikan merupakan bidang penting dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah inilah yang menjadi salah satu permasalahan serius yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pendidikan sebagai salah satu indikator kualitas pembangunan manusia merupakan prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal dan dapat menjadi penopang pembangunan daerah.

Untuk merealisasikan misi tersebut, maka adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 9**

TerCapainya Kewajiban Sekolah Pendidikan Dasar (9 Tahun) Bagi Penduduk Usia Sekolah

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9
TerCapainya Kewajiban Sekolah Pendidikan Dasar (9 Tahun) Bagi Penduduk Usia Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	TerCapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah	Angka Melek Huruf	62,14%	67,25%	108%%

Sumber data: LAKIP Dinas Pendidikan, 2021



Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis 9 di atas, dapat dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Angka Melek Huruf (AMH).

Dari tabel pengukuran di atas dapat dijelaskan bahwa angka melek huruf Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dapat tercapai 67,25% dari target 62,14% atau dengan tingkat capaian 108%.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, ketercapaian angka melek huruf di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada heketnya bukan karena keberhasilan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, akan tetapi pencapaian tersebut disebabkan karena penurunan target kinerja dari target sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan capaian-capaian sebelumnya angka melek huruf di Kabupaten Nias Selatan pada dasarnya belum mencapai angka ideal. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya penduduk Kabupaten Nias Selatan yang berusia di atas 65 tahun yang tidak bisa baca tulis dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk diberi pendidikan baca tulis.

Selain masih terdapatnya penduduk yang berusia di atas 65 tahun yang tidak bisa baca tulis, ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk dalam artian bahwa masih banyak anak-anak yang berada dalam usia belum bisa diajarkan baca tulis.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka melek huruf Kabupaten Nias Selatan berada pada angka 79%. Artinya pada tahun 2021, angka melek huruf di Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan terus



berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam peningkatan pemberian pendidikan bagi penduduk lanjut usia.

❖ Sasaran Strategis 10

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase lembaga satuan pendidikan yang terakreditasi	720 Lembaga	522 Lembaga	73%

Sumber data: LAKIP Dinas Pendidikan, 2021

Untuk mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Nias Selatan di bidang pendidikan, salah satu indikator kinerja yang menjadi perhatian utama dalam bidang pembangunannya adalah persentase lembaga satuan pendidikan yang terakreditasi.

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase lembaga satuan pendidikan yang terakreditasi dapat terealisasi sebanyak 522 lembaga satuan pendidikan sudah terakreditasi dari target 720 lembaga. Atau dengan tingkat capaian sebesar 73%.

Berdasarkan data dari laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021, jumlah lembaga satuan pendidikan yang mendapatkan sertifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Lembaga Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar
 - SDN 071115 Uluneho
 - SDN 075101 Aramo
 - SDN 075108 Susua
 - SDN 076090 Lahusa Susua



- SDN 078455 Hawauso
 - SDN 078497 Hilinifaoso
 - SDN 078507 Hilidanayao
 - SDN 078508 Hiliwosi
 - SDN 078509 Sikhorilafau
- b. Lembaga Satuan Pendidikan tingkat SMP
- SMPS Mitra Kasih BKPN
 - SMPS Nusantara Teluk Dalam
 - SMPN 1 Lahusa
 - SMPN 2 Teluk Dalam
 - SMPN 1 Ulususua
 - SMPN 1 Susua
 - SMPN 1 Somambawa
 - SMPN 1 Hilimegai

❖ Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku					
1	Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	10%	50%

Sumber data: LAKIP Dinas Pendidikan, 2020

Dari tabel analisis sasaran strategis 11 di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase pendidik dan tenaga



kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi dapat terealisasi sebesar 10% dari target 20% pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi. Berdasarkan data dari laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021, jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Nias Selatan berjumlah 4.708 orang. Artinya jumlah tenaga pendidik yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sejumlah 470 tenaga pendidik.

➤ **Misi 5**

“Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan”

Memperkuat sektor pertanian adalah semua usaha pembangunan yang memberi dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian dari semua aspeknya. Sedangkan kemandirian pangan adalah kondisi dimana kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi oleh produksi dari wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan kemandirian ini termasuk didalamnya usaha untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian serta meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan dan pada kondisi distribusi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan misi tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Adapun pengukuran dan analisis terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel pengukuran sasaran strategis sebagai berikut ini.



❖ Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan					
1	Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,49%	3,89%	111%

Sumber data: LAKIP Dinas Pertanian, 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri,

Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.



Dari tabel pengukuran sasaran strategis 12 di atas, dapat dijelaskan bahwa Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 3,89% dari target 3,49% atau dengan tingkat capaian 111%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 sebesar 7.164,27 milyar rupiah. Dimana sektor pertanian masih menjadi kontributor utama dengan peranan mencapai 44,61%. Artinya pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB sektor pertanian mencapai 3.196 milyar rupiah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah produksi beberapa jenis tanaman pertanian yang disebabkan oleh faktor seperti alih fungsi lahan pertanian, bencana alam, cuaca ekstrim dan juga hama dan penyakit tanaman. Untuk itu Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan sektor pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan agar pendapatan daerah di Sektor pertanian tetap menjadi penyumbang PDRB yang tertinggi di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya.



❖ Sasaran Strategis 13

Tersedianya Akses Bagi Petani Dalam Memperoleh Modal Usaha

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13
Tersedianya Akses Bagi Petani Dalam
Memperoleh Modal Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan					
1	Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan	50 UMKM	150 UMKM	300%

Sumber data: LAKIP Tenaga Kerja dan Koperasi UKM, 2021

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memajukan UMKM. Seiring dengan mewabahnya Virus Covid-19, beberapa program pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perekonomian sektor UMKM adalah dengan menciptakan Undang-undang Cipta Kerja, program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, pemberian KUR kepada masyarakat, menggalakkan Gernas BBI serta perluasan ekspor produk Indonesia.

Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dalam upaya pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Nias Selatan, salah satu target kinerja yang harus dicapai dan termuat dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan adalah “Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Permodalan”.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan pada



tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 150 UMKM dari target 50 UMKM, atau dengan tingkat capaian sebesar 300%.

Dari jumlah tersebut diharapkan dapat menyokong perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

❖ Sasaran Strategis 14

Tersedianya Data Informasi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14
Tersedianya Data Informasi Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Kehutanan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan					
1	Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,96%	-	-

Sumber data: LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur tingkat keseimbangan akan konsumsi aneka ragam pangan disuatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Semakin baik nilai PPH suatu wilayah maka situasi konsumsi atau ketersediaan pangan wilayah tersebut juga semakin bagus.

Dari tabel analisis sasaran strategis 14 di atas, dapat dijelaskan bahwa skor pola pangan harapan belum dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 anggaran kegiatan bidang ketahanan pangan di refocussing untuk penanganan dan pencegahan virus Covid-19 yang juga berdampak di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, skor pola



pangan harapan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 mencapai 77,6. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan capaian skor PPH seperti pada tahun 2018, dapat diartikan bahwa pola konsumsi pangan di Kabupaten Nias Selatan sudah dalam kategori cukup dan ketersediaan pangan sudah memadai.

❖ Sasaran Strategis 15

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Kehutanan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan					
1	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam kondisi baik	70%	65%	92%

Sumber data: LAKIP Dinas Pertanian, 2021

Dukungan sarana dan prasarana pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman, meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian. Jadi untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian, dukungan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi. Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik tentunya akan berdampak pada hasil pertanian yang maksimal.

Oleh sebab itu, salah satu indikator kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan hasil-hasil pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Nias



selatan adalah “Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam kondisi baik”. Dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021, persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutana dalam kondisi baik ditetapkan 70% sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Hingga tahun 2021 kondisi sarana dan prasaran tersebut dapat terealisasi sebesar 65% sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan masih dalam kondisi baik.

➤ **Misi 6**

“Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor”

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki berbagai macam potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Kabupaten Nias Selatan masih belum dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut menjadi modal utama dalam pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yaitu terus berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki demi pengembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan ekonomi tersebut disamping untuk meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi juga untuk menyerap tenaga kerja lokal. Pengembangan ekonomi ini dilakukan dengan upaya-upaya yang luas untuk menarik investasi dari para investor, baik investor dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri.

Untuk mewujudkan misi tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang harus dicapai yaitu meningkatnya investasi usaha, berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat, berkembangnya usaha



ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan serta berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumber daya lahan. Adapun pengukuran dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Investasi Usaha

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Investasi Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor					
1	Meningkatnya investasi usaha	Jumlah investor berskala nasional	3 Investor	7.405 Investor	2468%

Sumber data: LAKIP Dinas PMP2TSP ,2021

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 16 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi sebanyak 7.405 investor dari target 3 investor yang berinvestasi di Kabupaten Nias Selatan. Adapun kategori investor tersebut seluruhnya adalah tergolong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pencapaian target kinerja tersebut pada dasarnya disebabkan oleh sistem pelayanan yang cepat melalui aplikasi OSS. Adapun nilai investasi dari para investor tersebut berjumlah Rp.206.054.110.109 (dua ratus enam milyar lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).



- ❖ Sasaran Strategis 17
Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal Yang Menyerap
Tenaga Kerja Setempat

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17
Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal Yang Menyerap
Tenaga Kerja Setempat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor					
1	Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat	Persentase menurunnya angka pengangguran	4%	4,15%	103%

Sumber data: LAKIP Dinas Tenaga Kerja-KUKM, 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2021 adalah 165.452 orang orang yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja yang bekerja sebanyak 158.587 orang dan dan pengangguran terbuka sebanyak 6.865 orang. Angkatan kerja yang sudah bekerja pada tahun 2021 terbagi ke dalam beberapa kelompok yaitu bekerja sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nias Selatan mencapai 155.175 orang yang terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu angkatan kerja yang bekerja sebanyak 149.324 orang dan pengangguran terbuka sebanyak 5.851 orang. Artinya sampai dengan tahun 2021, angkatan kerja di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan yang signifikan, baik angkatan kerja yang sudah bekerja maupun angkatan kerja yang masih pengangguran. Dari tabel pengukuran sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 persentase menurunnya



angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan dapat tercapai 4,15% dari target 4% atau dengan tingkat capaian sebesar 103%. Artinya pada tahun 2021, angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan mengalami sedikit penurunan. Adapun upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mengatasi tingginya angka pengangguran tersebut adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang memfasilitasi penerimaan pegawai yang juga sekaligus pegawai/pekerja tersebut bisa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

Namun secara umum dapat diuraikan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan masih sangat tinggi. Adapun beberapa permasalahan yang muncul dari tingginya angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat trauma dan tidak ingin bekerja jika lowongan pekerjaan yang ditawarkan bersumber dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena setiap tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri diperlakukan secara tidak adil.
2. Sebagian besar masyarakat belum memahami tentang ketenagakerjaan.
3. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan selama ini hanya sampai kepada masyarakat yang dekat dengan ibu kota kabupaten dan kecamatan.
4. Belum ditetapkannya UMK Kabupaten
5. Kurangnya SDM tenaga kerja yang terlatih.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Pelaksanaan sosialisasi tentang ketenagakerjaan
2. Pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
3. Ditetapkannya besaran UMK di Kabupaten Nias Selatan.



❖ Sasaran Strategis 18

Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Perikanan dan Kelautan

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18
Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru
dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah
Berkembang Berbasis Perikanan dan Kelautan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor					
1	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan	Persentase Pertumbuhan PDB sektor perikanan	6,1%	5,37%	88%

Sumber data: LAKIP Dinas Kelautan & Perikanan, 2021

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen). PDB perikanan tersebut hanya didasari pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2021 sebesar 5,37%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,4%.

Dari tabel pengukuran di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja persentase pertumbuhan PDB sektor perikanan hanya



terrealisasi sebesar 5,37% dari target 6,1% pertumbuhan PDB sektor perikanan atau dengan tingkat capaian 87,21%. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga ke wilayah Kabupaten Nias Selatan sehingga membuat kegiatan para pelaku usaha dalam bidang perikanan berkurang baik aktivitas nelayan maupun pengolah hasil produksi perikanan dan tidak terlepas juga berkurangnya kegiatan pembudidaya ikan sehingga pendapatan pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan serta para nelayan menurun dan sangat mempengaruhi peningkatan sektor perekonomian masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, ketidakberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat kecil, tidak tersedianya investasi pada sektor perikanan dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan.

Oleh sebab itu, adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB sektor perikanan tersebut antara lain meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budiday, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi perikanan, supply chain dari hulu sampai ke hilir dan penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi stakeholder perikanan.

❖ Sasaran Strategis 19

Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Sumber Daya Lahan



Tabel 3.22
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19
Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru
dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah
Berkembang Berbasis Sumber Daya Lahan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor					
1	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumber daya lahan	Persentase koperasi aktif	100%	60%	60%

Sumber data: LAKIP Disnaker K-UKM, 2021

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja “Persentase Koperasi Aktif” pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 60% Koperasi aktif dari target 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 60%. Ketidakberhasilan pencapaian target kinerja tersebut pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada keberlangsung hidup dari koperasi-koperasi yang selama ini berjalan.

➤ **Misi 7**

“Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Kebudayaan”

Pariwisata adalah perjalanan temporer seseorang yang secara sengaja dari tempat menetap atau bekerjanya untuk mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau tempat tujuan. Mengembangkan pariwisata seluruh usaha sistematis dan terus menerus yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan aset daerah baik berupa fisik maupun non fisik yang sesuai untuk merangsang



wisatawan melakukan perjalanan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Potensi yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik di Kabupaten Nias Selatan adalah warisan budaya yang mempunyai nilai historis kultural yakni rumah adat dan budaya lompat batu. Jika hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, maka dapat digunakan sebagai penggerak pemangunan ekonomi Kabupaten Nias Selatan, karena sektor pariwisata mempunyai *multiplier effect* yang tinggi. Oleh karena itulah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya Kabupaten Nias Selatan secara optimal adalah hal utama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan.

Adapun beberapa permasalahan pariwisata yang terkait dengan dengan bidang pariwisata yaitu masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya, kurang terpromosikannya budaya lokal, kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif, kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional, belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi, kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya, belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak swasta dalam pengembangan objek wisata, belum optimalnya promosi objek wisata, kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

Dari berbagai masalah seperti yang diuraikan di atas pada hakekatnya berdampak pada tidak berkembangnya ekonomi



masyarakat sebagai salah satu penunjang dalam peningkatan pendapatan daerah.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan misi pemerintah daerah tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Nias Selatan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata itu sendiri. Adapun pengukuran dan analisis terhadap sasaran strategis itu, dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ Sasaran Strategis 20

Meningkatnya Usaha Yang Terkait Dengan Sektor Pariwisata

Tabel 3.23
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20
Meningkatnya Usaha Yang Terkait
Dengan Sektor Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 7 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alama dan Kebudayaan					
1	Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	4,5%	1,94%	43%

Sumber data: LAKIP Disbudparpora, 2021

Dari tabel pengukuran sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata hanya terealisasi sebesar 1,94% dari target 4,5% atau dengan tingkat capaian 43%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan PDRB sektor pariwisata terdiri dari penyediaan akomodasi, makan dan minum beserta jasa lainnya. Adapun PDRB Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.4.332.630.000;000



(empat triliun tiga ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk PDRB sektor pariwisata mempunyai target 3% atau Rp.129.978.900.000 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp.84.220.000.000 (delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) atau 1,94% dari PDRB Kabupaten Nias Selatan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target PDRB dari sektor pariwisata pada tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia
2. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang retribusi daerah yang didalamnya meliputi sektor pariwisata
3. Kurang memadainya infrastruktur menuju objek wisata
4. Kurangnya SDM dalam bidang pariwisata.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka salah satu unsur penting yang dapat dilaksanakan adalah dengan menyusun regulasi-regulasi yang mengatur tentang retribusi daerah sektor pariwisata. Selain itu, untuk menunjang berkembangnya kepariwisataan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, selain pelaksanaan promosi pariwisata, pembenahan infrastruktur wisata, pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat pelaku pariwisata juga menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan.



- ❖ Sasaran Strategis 21
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Tabel 3.24
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 7 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alama dan Kebudayaan					
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	12.000 orang	11.731 orang	97%

Sumber data: LAKIP Disbudparpora, 2021

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 adalah 11.731 orang dari target 12.000 orang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Jumlah tersebut masing-masing 231 orang wisatawan mancanegara dan 11.500 orang wisatawan nusantara.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terealisasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut bukan semata-mata sudah melampaui target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi peningkatan tersebut disebabkan karena adanya kelonggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembatasan aktivitas masyarakat yang mana pada tahun 2020 yang lalu masyarakat sangat dibatasi dalam melakukan aktivitas diluar akibat Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara.



➤ **Misi 8**

“Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter, Berbudaya dan Beriman”

Generasi muda adalah kelompok penduduk yang berusia 0-30 tahun. Membangun generasi muda adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk memperkuat baik fisik maupun non fisik kelompok penduduk yang berusia 0-30 tahun. Karakter adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan. Budaya merupakan satu keseluruhan (kompleksitas) aktivitas atau tindakan yang berpola dari manusia dalam satu masyarakat, baik yang bersifat abstrak maupun nyata. Sedangkan beriman adalah mempunyai kepercayaan yang kuat akan adanya kekuatan diluar kekuatan manusia atas apa yang terjadi pada dinamika manusia dan alam.

Oleh sebab itu, membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman merupakan salah satu misi yang harus dicapai dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui penyaluran bakat-bakat pemuda.

Untuk mewujudkan misi tersebut, salah satu sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase cabang olahraga yang berprestasi dan persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi. Namun dengan masih tingginya kasus Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, alokasi anggaran untuk pencapaian target-target kinerja tersebut direlokasi untuk anggaran penanganan dan pengendalian Covid-19. Selain itu juga, masyarakat diwilayah Kabupaten Nias Selatan masih enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya diluar dari wilayah Kabupaten Nias Selatan.



➤ **Misi 9**

“Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat”

Memberikan rasa aman adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kondisi kehidupan masyarakat yang bebas dari bahaya (alam maupun non-alam) dan gangguan, memiliki rasa tentram atau tidak merasa khawatir serta adanya kepastian dalam sistem kehidupannya. Memberikan rasa nyaman adalah memberikan kondisi kehidupan yang segar, sehat dan enak untuk tinggal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan misi tersebut pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai yang dimuat dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021. Adapun pengukuran dan analisis terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel pengukuran sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 24**

Terciptanya Suasana dan Kondisi Yang Kondusif Ditengah Masyarakat

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24
Terciptanya Suasana dan Kondisi Yang
Kondusif Ditengah Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
1	Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	13,07%	65,34%



	ditengah masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial, agama dan terorisme	80%	-	-
--	---------------------	---	-----	---	---

Sumber data: LAKIP Satpol PP dan Badan Kesbangpol, 2021

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase penanganan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban umum pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 13,07% dari target 20% penanganan kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani atau dengan tingkat capaian sebesar 65,34%.

Dari data laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, dijelaskan bahwa dari 176 pelanggaran yang dilaporkan atau terindikasi melanggar ketentraman dan ketertiban umum, yang ditangani pada tahun 2021 hanya berjumlah 23 kasus. Adapun kasus-kasus tersebut adalah pelanggaran pada penggunaan badan jalan raya oleh sebagian pedagang ikan dan pedagang asongan di wilayah Kota Teluk Dalam. Dimana pedagang-pedagang tersebut menjual dagangannya di Pusat Kota Teluk Dalam. Beberapa solusi dalam penanganan tersebut salah satunya merelokasi para pedagang tersebut di tempat/pasar yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Sedangkan indikator kinerja “Persentase Penanganan Konflik Sosial, Agama dan Terorisme” tidak dapat diuraikan karena tidak adanya data dari Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.



- ❖ Sasaran Strategis 25
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Mitigasi dan
Pengelolaan Dampak Dari Bencana Alam

Tabel 3.26
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Mitigasi dan
Pengelolaan Dampak Dari Bencana Alam

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Persentase masyarakat yang tanggap bencana	75%	-	-

Sumber data: LAKIP BPBD, 2021

Berdasarkan data dari tabel analisis capaian sasaran strategis 25 di atas, indikator kinerja persentase masyarakat yang tanggap bencana tidak dapat uraikan karena selain relokasi anggaran kegiatan ke penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 juga di sebabkan karena penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai akibat dari wabah Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Nias Selatan.

Namun jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat yang tanggap bencana di wilayah Kabupaten Nias Selatan bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang sudah paham dan tanggap bencana. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Nias Selatan yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan dan berada pada zona yang rentan terjadi bencana, masyarakatnya sudah sebagian besar memahami tata cara penyelamatan diri jika ada bencana (Gempa dan tsunami). Selain itu, pelaksanaan sosialisasi tanggap bencana sebelum terjadi pandemi Covid-19 juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.



❖ Sasaran Strategis 26

Terjaganya Kelestarian Lingkungan dan Terkendalinya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Tabel 3.27

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26
Terjaganya Kelestarian Lingkungan dan Terkendalinya Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
1	Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks pencemaran udara	86,58%	95,82%	110%

Sumber data: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 26 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks pencemaran udara.

Indeks pencemaran udara merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dan menilai seberapa besar terjaganya kelestarian lingkungan. Lingkungan yang baik dan bersih akan menentukan seberapa besar tingkat pencemaran udaranya. Pencemaran udara yang kecil akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan manusia yang ada didalamnya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, indeks pencemaran udara pada dasarnya ditentukan oleh PM_{2,5}, PM₁₀, SO₂, NO₂, CO dan CO₂ serta zat-zat oksidan lainnya. Berdasarkan pengamatan langsung diwilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020, pencemaran udara yang disebabkan oleh zat PM_{2,5} dan PM₁₀ tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kabupaten Nias Selatan belum adanya kegiatan-kegiatan vulkanik atau adanya kebakaran hutan



yang sangat luas. Sedangkan pencemaran udara yang dihasilkan oleh pembakaran dari kendaraan dan aktivitas masyarakat (CO dan CO₂) masih bersifat lokal sehingga tidak mempengaruhi kualitas udara secara keseluruhan.

Sementara SO₂, NO₂ dan zat-zat oksidan lainnya sebagian dihasilkan dari asap yang dibuang oleh pabrik dan kendaraan bermotor. Di wilayah Kabupaten Nias Selatan, gas-gas ini hanya dihasilkan dari kendaraan bermotor dalam jumlah yang tidak terlalu besar oleh karena jumlah kendaraan yang tidak terlalu banyak tidak seperti di kota-kota besar.

Namun berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, Kabupaten Nias Selatan memiliki indeks pencemaran udara 95,82%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2021 bersama dengan petugas sampler Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan. Adapun beberapa titik sampler yang dipasang meliputi:

1. Mewakili Pasar Teluk Dalam dipasang disamping Pos Polisi Kota Teluk Dalam
2. Mewakili Perumahan Penduduk, dipasang di Rumah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan di Baloho-Teluk Dalam
3. Mewakili Industri di pasang di depan PLN Teluk Dalam Km. 6 Arah Lagundri
4. Mewakili Perkantoran, dipasang di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, KM. 7 Teluk Dalam.

Dari hasil uji pelaksanaan sampler pengukuran kualitas udara di 4 (empat) titik tersebut, kualitas udara di Kabupaten Nias Selatan mencapai 95,82% atau berindeks Sangat Baik. Merujuk pada tabel analisis sasaran strategis diatas, dapat



disimpulkan bahwa indeks pencemaran udara di Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi sebesar 95,82% dari target 86,58% indeks pencemaran udara atau dengan tingkat capaian 110%.

Adapun upaya peningkatan kualitas udara yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran di Kota Teluk Dalam adalah dengan melakukan pengangkutan sampah-sampah kota ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

❖ Sasaran Strategis 27

Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Nyaman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik

Tabel 3.28
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27
Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Nyaman dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
1	Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Indeks Mutu Air Minum	51,11	51,11	100%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,25	0,27	108%

Sumber data: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup & PRKP, 2020

Berdasarkan data capaian indikator kinerja di atas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Mutu Air di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 51,11 dari target kinerja sebesar 51,11 atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pengukuran indeks mutu air di Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan melalui pemantauan kualitas air minum yang dilaksanakan di beberapa Depot Air Minum (DAM) di sekitar Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Pelaksanaan pemantauan berupa inspeksi kelengkapan dokumen serta



pengujian hasil laboratorium kualitas air dan inspeksi kebersihan depot dan lingkungan usaha DAM. Dari hasil inspeksi tersebut beberapa DAM yang dikunjungi telah memenuhi syarat kelayakan kualitas air minum yang baik. Indikator suatu air minum dikatakan baik dan layak harus sesuai dengan ambang batas kualitas air sesuai dengan Permenkes Nomor 491/Menkes/PER/IV/2010 dan dokume inspeksi Sanitasi DAM Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014. Pelaksanaan inspeksi di wilayah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2021 sangat terbatas hanya mencakup wilayah Kecamatan Teluk Dalam dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan indikator kinerja “Rasio Rumah Layak Huni” yang terealisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,27% dari target 0,25% atau dengan tingkat capaian 108%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa rasio rumah layak huni di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan.

Untuk mencapai target pada periode RPJMD 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengupayakan strategi pencapaian target persentase rumah layak huni dengan sumber-sumber pendanaan lainnya melalui kegiatan bantuan perumahan melalui sumber pendanaan DAK APBN Pusat. Pada Tahunan 2021 pembangunan rumah layak huni yang bersumber DAK APBN Pusat berjumlah 125 unit yang meliputi beberapa kecamatan seperti Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Toma, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Susua dan Kecamatan Onohazumba.

❖ Sasaran Strategis 28

Tersedianya Infrastruktur Dasar Kehidupan (Listrik dan Air Bersih) Yang Cukup



Tabel 3.29
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 28
Tersedianya Infrastruktur Dasar Kehidupan
(Listrik dan Air Bersih) Yang Cukup

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
1	Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	87,89%	13,56%	15%

Sumber data: LAKIP Dinas PUPR, 2021

Listrik dan air bersih pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Listrik dan air bersih merupakan kebutuhan yang paling pokok dan penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Sebagai salah satu wilayah yang dikelilingi oleh lautan bebas, ketersediaan listrik dan air bersih di wilayah Kabupaten Nias Selatan masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Nias Selatan juga berupaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakatnya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.

Dari tahun ke tahun, pembangunan sarana air bersih oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus dilakukan. Hal ini tentu bertujuan tidak lain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih.

Dari tabel analisis sasaran strategis diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih, pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 13,56% dari target 87,89% atau dengan tingkat



capaian sebesar 15% Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat terealisasi sebesar 100%. Artinya pada tahun 2021, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan. Penurunan tersebut pada dasarnya disebabkan karena minimnya anggaran yang tersedia sebagai akibat dari relokasi anggaran yang lebih difokuskan pada penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 yang juga melanda Kabupaten Nias Selatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks meningkatkan ekonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “*money follows function*” yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan meningkat baik dari PAD maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan dana perimbangan mengalami peningkatan. Rencana pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2021 penerimaan pajak daerah direncanakan meningkat terutama penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak rumah, pajak hiburan,



pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan lainnya, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2) Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari yang diproyeksikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, penerimaan retribusi daerah mengalami sedikit kenaikan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari yang diproyeksikan. Hal demikian jika dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari yang diproyeksikan. Demikian juga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan.

b. Pendapatan Transfer

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2021 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat terdiri dari:



a) Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dari dana perimbangan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari besaran dana yang diproyeksikan.

b) Dana Desa

Penerimaan pendapatan dari dana desa pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari total anggaran yang diproyeksikan.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 hanya bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengalami penurunan dari pendapatan yang diproyeksikan.

Pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- b. Intensifikasi penerimaan PAD baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah termasuk didalamnya penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;
- c. Optimalisasi pemungutan piutang pajak daerah melalui penagihan aktif;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung perangkat daerah agar dapat mendorong



peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentukan PAD; dan

- e. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui APBD Perubahan Tahun 2021 menganggarkan pendapatan sebesar Rp.1.461.332.092.084,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.401.145.250.515,16 (satu triliun empat ratus satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus lima belas rupiah enam belas sen) atau dengan tingkat capaian sebesar 95,88%.

Kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp.924.592.403.142 (sembilan ratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.908.496.178.535 (sembilan ratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau dengan tingkat capaian 98,26%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp.63.056.696.948 (enam puluh tiga milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.32.822.657.272,16 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah enam belas sen), atau dengan tingkat capaian sebesar 52,05%



Gambaran umum tentang anggaran dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	PENDAPATAN	1.461.332.082.084	1.401.145.250.515	95,88%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.056.696.948,00	32.822.657.272,16	52,05%
4.1.1	Pajak Daerah	12.058.816.212,00	8.806.322.592,62	73,03%
4.1.2	Retribusi Daerah	445.024.224,00	168.732.630,00	37,92%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.276.351.984,00	5.697.181.857,00	31,17%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	32.276.504.528,00	18.150.420.192,54	56,23%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.319.223.981.220,00	1.295.553.732.105,00	98,21%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.275.731.153.142,00	1.255.472.466.063,00	98,41%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	924.592.403.142,00	908.496.178.535,00	98,26%
4.2.1.2	Dana Desa	351.138.750.000,00	346.976.287.528,00	98,81%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.492.828.078,00	40.081.266.042,00	92,16%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.492.828.078,00	40.081.266.042,00	92,16%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.051.403.916,00	72.768.861.138,00	92,05%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	79.051.403.916,00	72.768.861.138,00	92,05%

Sumber data: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, 2021



2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal. Belanja modal terdiri dari rincian atas jenis belanja modal
- c. Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga terdiri dari rincian atas jenis belanja tidak terduga
- d. Belanja Transfer, meliputi: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Total anggaran belanja daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.549.477.546.628,80 (Satu triliun lima ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dan terealisasi sebesar Rp.1.411.390.331.215,25 (satu triliun empat ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah dua puluh lima sen) atau dengan tingkat capaian sebesar 91,09%.

Untuk lebih jelas, anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	BELANJA	1.065.186.116.669	932.485.745.115	87,54%
5.1	BELANJA OPERASI	766.003.670.194,80	687.216.771.816,08	89,71%
5.1.1	Belanja Pegawai	387.891.398.666,65	366.078.209.392,00	94,38%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.433.433.198,15	298.935.202.627,08	85,55%
5.1.4	Belanja Subsidi	3.207.201.300,00	3.203.700.000,00	99,89%
5.1.5	Belanja Hibah	15.555.929.930,00	14.987.498.266,00	96,35%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.915.707.100,00	4.012.161.531,00	40,46%
5.2	BELANJA MODAL	298.118.808.474,00	245.107.576.769,17	82,22%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	-	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.272.188.999,00	44.732.853.314,00	94,63%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.690.898.377,00	99.210.146.287,79	84,30%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	130.144.685.486,00	98.819.290.526,38	75,93%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.811.035.612,00	2.345.286.641,00	83,43%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.063.638.000,00	161.396.530,00	15,17%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.063.638.000,00	161.396.530,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	483.541.045.916,00	478.904.586.100,00	99,04%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	483.541.045.916,00	478.904.586.100,00	99,04%

Sumber data: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, 2021

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terbagi kedalam 2 (dua) komponen yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Nias Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 disesuaikan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 adalah penyerataan modal atau investasi pemerintah daerah.

Untuk lebih jelas, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.32
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	13.193.699.252,95	13.193.259.417,95	100%
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	13.193.699.252,95	13.193.259.417,95	100%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	891.813.186	891.813.186	100%
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	891.813.186	891.813.186	100%

Sumber data: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, 2021

C. Penghargaan

Selama tahun 2021, adapun penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah Penghargaan sebagai Peserta Terbaik atas Ketepatan Waktu dan Akurasi Pembayaran Iuran Wajib BPJS Tahun 2021 dan Sertifikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.



BAB IV

PENUTUP

Perwujudan penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penetapan dan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya penggunaan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan. Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Subtansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada dasarnya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun ke-5 atau tahun terakhir perencanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Nias Selatan pada arah visi dan misi Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2016 RPJMD Kabupaten Nias Selatan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 dengan visi **“Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat dan Cerdas Dengan Kepemimpinan Yang Melayani, Jujur dan Sederhana”**.

Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa kegiatan dan capaian kinerja Kabupaten Nias Selatan yang dijumpai pada tahun 2021, akan tetapi akuntabilitas kinerja seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum sudah terlaksana, meskipun pada kenyataannya banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Adapun pencapaian kinerja dari setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab, terdiri dari 3 (tiga) indikator



- dengan rata-rata capaian sebesar 45,3%. Nilai capaian dari sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori C atau kurang.
2. Sasaran Strategis 2: Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 76% atau sangat baik.
 3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 92% atau sangat memuaskan.
 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten, terdiri dari 2 (dua) indikator dengan rata-rata tingkat capaian 84% atau Memuaskan.
 5. Sasaran strategis 5: Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 59.5%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori CC atau Cukup.
 6. Sasaran Strategis 6: Berkurangnya angka kematian penduduk, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 99,9%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan.
 7. Sasaran Strategis 7: Tersedianya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan terjangkau, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 33%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori C atau kurang.
 8. Sasaran Strategis 8: Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 60%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori CC atau Cukup.
 9. Sasaran Strategis 9: Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah, terdiri dari 1 (satu)



indikator dengan tingkat capaian sebesar 108%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan.

10. Sasaran Strategis 10: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian 73% atau terkategori Sangat Baik.
11. Sasaran Strategis 11: Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 50% atau terkategori CC atau cukup.
12. Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 111%, terkategori AA atau sangat memuaskan.
13. Sasaran Strategis 13: Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 300%, terkategori AA atau sangat memuaskan.
14. Sasaran Strategis 14: Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 0%. Nilai capaian sasaran strategis ini tidak dapat diukur karena tidak tersedianya data dari instansi yang membidangi.
15. Sasaran Strategis 15: Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 92%, terkategori sangat memuaskan.
16. Sasaran Strategis 16: Meningkatnya investasi usaha, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar >100% atau terkategori AA atau sangat memuaskan.
17. Sasaran Strategis 17: Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat, terdiri dari 1 (satu) indikator



dengan tingkat capaian 103%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan.

18. Sasaran Strategis 18: Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 88%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori A atau memuaskan.
19. Sasaran Strategis 19: Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumber daya lahan, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 60%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori CC atau Cukup.
20. Sasaran Strategis 20: Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 43% atau terkategori C atau kurang.
21. Sasaran Strategis 21: Meningkatnya kunjungan wisatawan, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 97% atau terkategori sangat memuaskan.
22. Sasaran Strategis 22: Terbentuknya generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan berprestasi, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 0%. Target kinerja tersebut tidak dapat dicapai karena wabah Pandemi Covid-19.
23. Sasaran Strategis 23: Membentuk generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 0%. Target kinerja tersebut tidak dapat dicapai karena wabah Pandemi Covid-19
24. Sasaran Strategis 24: Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 32%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori C atau kurang.



25. Sasaran Strategis 25: Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian rata-rata 0%. Target kinerja tersebut tidak dapat dijelaskan karena tidak tersedianya data dan anggaran.
26. Sasaran Strategis 26: Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sebesar 110%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori AA atau Sangat Memuaskan.
27. Sasaran Strategis 27: Terciptanya lingkungan yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, terdiri dari 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 104%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori AA atau sangat memuaskan.
28. Sasaran Strategis 31: Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 15%. Nilai capaian sasaran strategis ini masuk ke dalam kategori D atau sangat kurang.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dalam pengerjaan jenis laporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, IPPD dan laporan keuangan daerah, dengan mekanisme yang berbeda-beda dan dengan tenggat waktu penyelesaian laporan yang bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terkonsentrasinya penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya inefisiensi pengalokasian sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi penyusunan



laporan. Banyaknya jenis laporan yang harus disusun dengan tenggat waktu bersamaan menjadikan pekerjaan yang tidak efektif bagi seluruh perangkat daerah penyusun laporan.

2. Perencanaan kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum memuat indikator kinerja yang dapat diukur. Indikator kinerja yang dimuat dalam perjanjian kinerja adalah lebih kepada proses dan kegiatan.
3. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, tidak sesuai dan tidak relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan. Hal ini menyebabkan penjelasan dan analisis kinerja belum akurat dideskripsikan.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, diharapkan supaya:

1. Perlu dilakukannya *review* terhadap dokumen perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penetapan indikator kinerja dan target realisasi yang ada dalam dokumen perencanaannya. Hal ini bertujuan supaya adanya sinkronisasi antara indikator kinerja renstra perangkat daerah, rencana kerja dan perjanjian kinerja masing-masing perangkat daerah.
2. Perlu dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama setiap perangkat daerah yang melibatkan peran serta KEMENPAN-RB dalam proses perbaikan dan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terutama dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan landasan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
3. Perlu dilaksanakannya sosialisasi berkelanjutan kepada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
4. Perlu peningkatan pengendalian, koordinasi dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan.



5. Setiap program/kegiatan yang direncanakan harus jelas capaian kinerjanya, sehingga hasil dari evaluasi pelaporan kinerja setiap perangkat daerah menjadi bahan/gambaran dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
6. Perlu dilakukan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta evaluasi melalui *e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP*.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*operational plan*), rencana kinerja (*performance plan*), rencana anggaran (*financial plan*) dan rencana strategis (*strategic plan*) pada masa mendatang.

Sangat disadari betul bahwa laporan ini belum mampu menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : **BUPATI NIAS SELATAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka **mencapai** target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Teluk Dalam, 08 Oktober 2021

BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 : Membangun Kultur Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab	Nilai SAKIP	CC
		Nilai LPPD	ST
		Opini BPK	WTP
2	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	51%
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Dengan Skala Prioritas Yang Berbasis Desa			
3	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Perdesaan	Persentase Infrastruktur Pedesaan dalam kondisi baik	65%
4	Meningkatnya Akses Dari Wilayah Perdesaan Ke Wilayah Kecamatan Dan Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	90%
		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	4,7%
5	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar/Umum	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	80%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%
Misi 3 : Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Mudah dan Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
6	Berkurangnya Angka Kematian Penduduk	Angka Harapan Hidup	68,75
7	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Yang Menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,12 / 1000
8	Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Profesional Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Terdistribusi Merata	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,20
Misi 4 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku			
9	Tercapainya Kewajiban Sekolah Pendidikan Dasar (9 Tahun) Bagi Penduduk Usia Sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)	62,14%
10	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Lembaga Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi	720 Lembaga
11	Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	20%
Misi 5 : Memperkuat Sektor Pertanian Menuju Kemandirian Pangan			
12	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,49%
13	Tersedianya Akses Bagi Petani Dalam Memperoleh Modal Usaha	Jumlah UMKM Yang Mendapatkan Bantuan Permodalan	50 UMKM

14	Tersedianya Data Informasi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan	Skor PPH Kabupaten Nias Selatan	77,96
15	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam kondisi baik	70%
Misi 6 : Mengembangkan Ekonomi Yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendatangkan Investor			
16	Meningkatnya Investasi Usaha	Jumlah Investor berskala Nasional	3 Investor
17	Berkembangnya Ekonomi Usaha Lokal Yang Menyerap Tenaga Kerja Setempat	Persentase menurunnya angka pengangguran	4%
18	Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru Dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Perikanan Dan Kelautan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	6,1%
19	Berkembangnya Usaha Ekonomi Baru Dan Semakin Kuatnya Ekonomi Yang Telah Berkembang Berbasis Sumber Daya Lahan	Persentase Koperasi Aktif	100%
Misi 7 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Kebudayaan			
20	Meningkatnya Usaha Yang Terkait Dengan Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	4,5%
21	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	12.000 Orang
Misi 8 : Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter, Berbudaya dan Beriman			
22	Terbentuknya Generasi Muda Yang Kreatif, Inovatif, Terampil Dan Berprestasi	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	5%
23	Membentuknya generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Berprestasi	3%
Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
24	Terciptanya Suasana Dan Kondisi Yang Kondusif Di Tengah Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%
		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	72%
		Persentase penanganan konflik sosial, agama dan terorisme	80%
25	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Persentase Masyarakat Yang Tanggap Bencana	75%
26	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Dan Terkendalinya Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	86,58
27	Terciptanya Lingkungan Yang Nyaman Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik	Indeks Mutu Air Minum	51,11
		Rasio Rumah Layak Huni	0,25
28	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kehidupan (Listrik Dan Air Bersih) Yang Cukup	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	87,89%

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.946.985.990
2	Program Pengelolaan Pendidikan	166.572.851.227
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	183.420.080.311
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.127.989.470
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.137.344.950
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	14.783.820.092
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.643.554.972
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.568.181.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	10.089.803.155
10	Program Penyelenggaraan Jalan	86.558.809.341
11	Program Kawasan Permukiman	2.654.016.300
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	141.561.000
13	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	152.170.000
14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	23.875.000
15	Program Penanggulangan Bencana	4.832.854.583
16	Program Pemberdayaan Sosial	459.194.495
17	Program Rehabilitasi Sosial	15.000.000
18	Program Penanganan Bencana	313.479.000
19	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49.473.210
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.649.900
21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	108.202.920
22	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	82.088.700
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	82.088.500
24	Program Pengembangan UMKM	267.923.880
25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.212.800.000
26	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.147.206.850
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	879.700.000
28	Program Pengawasan Keamanan Pangan	248.523.512
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	353.530.000
30	Program Pengelolaan Persampahan	209.911.000
31	Program Pendaftaran Penduduk	2.678.554.600
32	Program Pencatatan Sipil	47.550.000
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	311.624.200
34	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	478.023.040
35	Program Pengelolaan Pelayaran	1.089.393.400
36	Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.450.463.865

37	Program Aplikasi Informatika	565.346.000
38	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.152.933.600
39	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	107.330.300
40	Program Promosi Penanaman Modal	27.520.000
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.961.600
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15.815.000
43	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	723.376.500
44	Program Pengembangan Kebudayaan	708.868.250
45	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	11.280.573.571
46	Program Pemasarana Pariwisata	70.919.695
47	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	616.127.144
48	Program Pembinaan Perpustakaan	50.620.000
49	Program Pengelolaan Ikan Tangkap	1.699.047.990
50	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.270.000
51	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	54.980.000
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.961.179.670
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.094.986.247
54	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79.671.700
55	Program Penyuluhan Pertanian	205.000.000
56	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.351.380
57	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18.369.115
58	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.213.000
59	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.812.369.589
60	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.744.602.825
61	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	34.711.908.408
62	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.000.784.980
63	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	640.444.880
64	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.186.380
65	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	488.002.404.300
66	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	681.272.900
67	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	669.295.540
68	Program Kepegawaian Daerah	1.241.037.070
69	Program Penyelenggaraan Pengawasan	278.529.700
70	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	31.500.000
71	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	360.922.420

72	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	97.471.150
73	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	584.263.457
74	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	124.126.710
75	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.065.240
76	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.497.229.930
77	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.380.925
78	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	37.866.000
79	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.145.000
Total Anggaran		1.549.477.546.629

Teluk Dalam, 08 Oktober 2021

BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH